



PETA MUTU PENDIDIKAN

**JENJANG
SMP**

**KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021**

**Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2020**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BALI

2021



PETA MUTU PENDIDIKAN

**JENJANG
SMP**

**KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021**

**Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2020**

Penulis :

Drs. I Gusti Agung Oka Yadnya, M.Pd.

Drs. I Wayan Suwita, M.Pd.

Editor :

I Ketut Agus Susilawan, S.Pd., M.Pd.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BALI
2021**



**PETA MUTU PENDIDIKAN
JENJANG SMP KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021**

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2020

ISBN : 978-623-7441-48-9

Penulis :

Drs. I Gusti Agung Oka Yadnya, M.Pd.
Drs. I Wayan Suwita, M.Pd.

Editor :

I Ketut Agus Susilawan, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul :

Heru Susanto

Tata Letak :

Gus Ryan

Penerbit :

LPMP PROVINSI BALI
Anggota IKAPI No. 018/BAI/16

Redaksi:

Jl. Letda Tantular No. 14 Niti Mandala Denpasar 80234
Telp. 0361 225666, Fax. 0361 246682
Pos-el : lpmpbali@kemdikbud.go.id
Laman : lpmpbali.kemdikbud.go.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

MOTTO:

**KETIKA SESEORANG BINGUNG
TENTANG POSISI, ARAH, DAN TUJUANNYA,
“KOMPAS” MENJADI KIBLATNYA**

**“PETA MUTU PENDIDIKAN IBARATNYA KOMPAS
BAGI SEMUA PEMANGKU KEPENTINGAN
BERKOLABORASI MENUJU PELAYANAN
PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS”**

PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat-Nya buku berjudul “Peta Mutu Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Buleleng tahun 2021” ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Selain itu, tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak tentu dalam penyusunan buku ini akan mengalami banyak kendala. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini disampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Kepala LPMP Provinsi Bali yang telah memfasilitasi proses penyusunan buku ini dari awal serta memberikan pendampingan berkelanjutan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, yang telah memberikan dukungan baik berupa materi maupun moril untuk penyelesaian buku ini.
3. Panitia pelaksana sosialisasi data capaian mutu LPMP Provinsi Bali yang telah memberikan penguatan bagi tim penulis sebelum melakukan penyusunan buku ini.
4. Anggota Tim Penulis yang telah bekerjasama dalam penyusunan naskah buku ini sampai final.
5. Editor yang dengan sabar dan tekun telah melakukan penyuntingan terhadap draf mentah buku ini sampai menjadi naskah siap terbit.
6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberi dukungan baik langsung maupun tidak langsung atas penyelesaian buku ini.

Atas bantuan dan darma baktinya semoga mendapat pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Walaupun Tim Penulis telah mengerahkan segenap kemampuan untuk mewujudkan buku ini, namun karena keterbatasan pengalaman tentu tidak luput dari kelemahan, kekurangan, dan ketidaksesuaian. Untuk itu, tegur sapa yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikannya. Terimakasih.

Singaraja, Juni 2021
Tim Penulis

KATA PENGANTAR KEPALA LPMP BALI

Sistem penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan, seperti: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. Adanya dukungan dari institusi-institusi tersebut dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal sesuai tugas dan kewenangannya akan memperkuat upaya satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Analisis peta mutu pendidikan di Bali tahun 2021 ini memaparkan gambaran umum peta mutu pendidikan Provinsi Bali Tahun 2020, analisis kekuatan dan kelemahan serta rekomendasi, penentuan program dan kegiatan, indikator kinerja serta pembiayaan. Hasil pada buku ini dapat dijadikan acuan bagi daerah Kabupaten Buleleng dalam membuat rencana strategis pada SKPD pada bidang pendidikan. Ini adalah salah satu wujud tugas dan wewenang Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bali melakukan dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sesuai yang diamanatkan dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sejak persiapan, pengolahan dan analisis peta mutu sampai penyusunan Analisis Peta Mutu Pendidikan tahun 2020 di Provinsi Bali. Semoga Analisis Peta Mutu Pendidikan ini dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan di Kabupaten/Kota maupun di Provinsi Bali.

Denpasar, 9 Oktober 2021
Kepala LPMP Bali



I Made Alit Dwitama, S.T., M.Pd
NIP. 197412252003121004

KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas asung kertha wara nugrahaNya buku Pemetaan Mutu Pendidikan Kabupaten Buleleng tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sistem penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Adanya dukungan dari institusi-institusi tersebut dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal sesuai tugas dan kewenangannya akan memperkuat upaya satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Analisis peta mutu pendidikan Kabupaten Buleleng 2020 ini memaparkan analisis capaian Standar Nasional Pendidikan, analisis kelemahan serta penelusuran data sampai kepada rekomendasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Buleleng. Ini adalah salah satu wujud tugas dan kewenangan Pokja Pemetaan TPMPD Kabupaten Buleleng untuk memetakan mutu pendidikan di Kabupaten Buleleng serta di tindak lanjuti oleh Pokja fasilitasi untuk mewujudkan satuan pendidikan yang bermutu sesuai dengan visi Dinas pendidikan Kabupaten Buleleng.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sejak persiapan, pengolahan dan analisis peta mutu sampai penyusunan Peta Mutu Pendidikan tahun 2020 di Kabupaten Buleleng. Semoga Peta Mutu Pendidikan ini dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan di Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 9 Oktober 2021

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olah Raga Kabupaten Buleleng



Made Astika, S.Pd. MM.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 196412311988031236

DAFTAR ISI

MOTTO	iii
PRAKATA.....	iv
KATA PENGANTAR LPMP PROVINSI BALI	v
KATA PENGANTAR KADISDIK KAB. BULELENG vi.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Rasional	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	4
D. Manfaat.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PETA MUTU PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019	6
A. Progres Pengiriman Data Dapodik	6
B. Progres Pengiriman, Hitung Rapor dan Olah Rapor Data PMP	12
C. Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Buleleng	22
D. Akar Masalah dan Rekomendasi	33
BAB III EVALUASI PERMASALAHAN PENGUMPULAN DATA PMP TAHUN 2020	42
A. Progres Sekolah Belum Kirim Data PMP	42
B. Progres Sekolah Belum Hitung Rapor Mutu	43
C. Capaian SNP Tertinggi dan Terendah Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020	44
D. Sekolah yang Minimal Telah Menuju SNP 4 Tahun 2020	46
F. Permasalahan Pengumpulan Data	49
BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI	51
A. Simpulan	51
B. Rekomendasi	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
BIOGRAFI PENULIS	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020	8
Tabel 1.2	Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SMP Provinsi Bali Tahun 2020	10
Tabel 1.3	Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020	10
Tabel 1.4	Progres Pengiriman data PMP Jenjang SMP Provinsi Bali tahun 2020	14
Tabel 1.5	Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020	15
Tabel 1.6	Capaian Progres Hitung Rapor Jenjang SMP Tingkat Provinsi Bali Tahun 2020	16
Tabel 1.7	Progres Hitung Rapor Mutu SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020	17
Tabel 1.8	Progres Olah Rapor Mutu Jenjang SMP Provinsi Bali Tahun 2020	19
Tabel 1.9	Progres Olah Rapor Mutu SMP Kabupaten Buleleng	20
Tabel 1.10	Rekapitulasi data PMP yang Terkirim, Terhitung Dan Terolah Jenjang SMP Provinsi Bali Tahun 2020	21
Tabel 1.11	Tabel Capaian Mutu SNP Jenjang SMP Provinsi Bali Tahun 2020	23
Tabel 1.12	Tabel Capaian Mutu SNP Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020	24
Tabel 1.13	Kategori Capaian Mutu SNP 26	
Tabel 1.14	Data Capaian Level Mutu SNP Jenjang SMP Tahun 2016 sampai 2020	26
Tabel 1.15	Perbandingan Capaian Mutu SNP Jenjang SMP Setiap Kecamatan di Kabupaten Buleleng tahun 2016 sampai 2020	27
Tabel 1.16	Capaian Mutu Standar dan Indikator Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020	28
Tabel 1.17	Capaian Indikator dan Sub Indikator pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020	31
Tabel 1.18	Daftar Sub Indikator Bernilai Rendah pada Standar Proses Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020	31
Tabel 1.19	Daftar Sub Indikator Bernilai Rendah pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020	32
Tabel 1.20	Daftar Sub Indikator Bernilai Rendah pada Standar Sarana dan Prasarana Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020	32
Tabel 1.21	Daftar 10 Sub Indikator Bernilai Rendah Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020	33
Tabel 1.22	Rekomendasi Peningkatan Mutu dan Sasaran yang Dituju pada Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020	36
Tabel 1.23	Sekolah dan Kategorinya Pada 10 Sub Indikator di Kecamatan Buleleng	38
Tabel 1.24	Sekolah dan Kategorinya Pada 10 Sub Indikator Buleleng Bagian Timur	39
Tabel 1.25	Sekolah dan Kategorinya Pada 10 Sub Indikator Buleleng Bagian Tengah	40
Tabel 1.26	Sekolah dan Kategorinya Pada 10 Sub Indikator Buleleng Bagian Barat	41

Tabel 2.1	Data SMP di Kabupaten Buleleng yang Belum Kirim PMP	42
Tabel 2.2	Data SMP Kabupaten Buleleng yang Belum Hitung Rapor	43
Tabel 2.3	Data SMP Kabupaten Buleleng yang Belum Hitung Rapor	44
Tabel 2.4	Peringkat 10 SMP dengan Capaian SNP Tertinggi	44
Tabel 2.5	Peringkat 10 SMP dengan Capaian SNP Terendah.....	45
Tabel 2.6	Data Sekolah yang Minimal Telah Menuju SNP Tahun 2020	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Kerja Analisis Data.....	3
Gambar 2.1	Laman Dapo Dikdasmen Kemdikbud	7
Gambar 2.2	Grafik Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020.....	9
Gambar 2.3	Grafik Progres Pengiriman Data Dapodik SMP Kabupaten Buleleng	11
Gambar 2.4	Laman Manajemen PMP Kemdikbud	13
Gambar 2.5	Grafik Capaian Progres Pengiriman Rapor Mutu Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020	15
Gambar 2.6	Grafik Capaian Progres Hitung Rapor Mutu Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020	18
Gambar 2.7	Grafik Capaian Progres Olah Rapor Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020	20
Gambar 2.8	Laman Rapor Mutu Dikdasmen Kemdikbud Tahun 2020	22
Gambar 2.9	Laman Rapor Mutu Dikdasmen Kemdikbud Provinsi Bali Tahun 2020	22
Gambar 2.10	Perbandingan Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Buleleng dari tahun 2016 sampai tahun 2020	25
Gambar 2.11	Grafik Capaian Level Mutu SNP Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2016 -2020	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Penjaminan mutu (*quality assurance*) menjadi faktor penting dalam dunia pendidikan. Tujuan penjaminan mutu adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sistem penjaminan mutu, baik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dipandang sebagai salah satu solusi untuk menjawab berbagai permasalahan dalam bidang pendidikan (<https://sevima.com/>).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional antara lain untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan mulia itu, pelaksanaan pendidikan harus bermutu. Pendidikan yang bermutu ditandai dengan berkualitasnya pelayanan di satuan-satuan pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan wajib dilakukan oleh setiap satuan pendidikan. Sejauh mana pelayanan yang dilakukan telah memenuhi standar mutu, perlu dilakukan proses penjaminan mutu secara terprogram, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Dalam kaitan itu, kerjasama antar lembaga dan kolaborasi antar pemangku-pemangku kepentingan sangat dibutuhkan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan berhasil tanpa adanya perbaikan sistem penyelenggaraannya (LPMP Bali, 2018). Terkait dengan hal tersebut, berbagai upaya dalam penjaminan mutu harus dilakukan. Langkah yang dilakukan LPMP Bali dan jajarannya, yang telah memprogramkan dan memberikan pendampingan kepada satuan-satuan pendidikan secara langsung dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sangatlah tepat. Kegiatan pendampingan ini telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dan semakin intensif. Hasil dari kerjasama ini telah tampak jelas dimana satuan-satuan pendidikan yang memperoleh pendampingan telah menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan.

Sebagai muara dari pelaksanaan SPMI itu diharapkan terjadi peningkatan mutu pelayanan satuan pendidikan terhadap siswa. Selanjutnya berdampak pada peningkatan kualitas *output* dan *outcome*. Semua ini dapat dilihat dari rapor mutu satuan pendidikan, yang diterbitkan oleh pemerintah setiap tahun. Dari rapor mutu tersebut selanjutnya dapat dilakukan pemetaan terhadap kemampuan setiap satuan pendidikan dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang dikenal dengan sebutan Peta Mutu Pendidikan (PMP).

PMP di masing-masing satuan pendidikan tidak cukup sebatas diketahui oleh pihak sekolah tetapi harus diketahui pula oleh semua pemangku kepentingan, dari jajaran pusat sampai daerah. Oleh karena itu, PMP tersebut perlu disosialisasikan dan dipublikasikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak terkait. Penyusunan buku PMP ini sangatlah strategis untuk tujuan mempublikasikan hasil analisis data mutu dan rekomendasinya. Buku PMP ini diharapkan dapat diterbitkan setiap tahun agar dapat dijadikan pegangan oleh satuan pendidikan untuk berbenah dan pihak-pihak terkait dalam memberi kontribusinya.

Pada sisi lain, dilihat dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di satuan-satuan pendidikan dan rapor mutu yang terbit setiap tahun, tampaknya belum tersosialisasikan dengan baik. Akibatnya proses perbaikan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang ditawarkan TPMPD juga kurang maksimal. Salah satu faktor penyebab dari hal ini adalah minimnya media sosialisasi dan publikasi yang dapat menggaungkan hal tersebut.

Untuk menjawab hal tersebut, perlu dibuat media penyebarluasan informasi tentang analisis data PMP dan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh TPMPD secara khusus. Media informasi ini dapat dibuat berupa buku, baik buku cetak maupun buku elektronik (*e-book*). Pemahaman tersebut menjadi salah satu argumentasi dalam penyusunan buku ini.

Dalam kajiannya, buku ini menggunakan pendekatan induktif, yang dimulai dari kajian data capaian pada tiap standar, kemudian dilanjutkan melihat data capaian rendah untuk tiap indikator, selanjutnya memperhatikan sub indikator yang memberi kontribusi terhadap rendahnya data capaian mutu indikator tersebut. Langkah selanjutnya meneropong akar masalah lanjut menyusun rekomendasinya. Agar rekomendasi yang dibuat tepat sasaran, maka langkah berikutnya adalah menemukan sekolah-sekolah yang mendapat data capaian rendah pada sub indikator terkait untuk menjadi sasaran rekomendasi tersebut. Secara garis besarnya dapat digambarkan proses analisisnya sebagai berikut.

Gambar 1.1 Alur kerja analisis data



Alur kerja analisis data seperti digambarkan di atas mengikuti pendekatan dari umum ke khusus (induktif). Proses ini dimulai dari nilai setiap standar. Standar yang bernilai tinggi maupun standar bernilai rendah dianalisis dengan mencermati nilai indikator dan nilai sub indikatornya. Pada sub indikator mana yang memiliki nilai rendah, dalam hal ini bintang 1 (★) dan bintang 2 (★★).

Pencermatan nilai sub indikator ini sangat penting dilakukan karena bagian tersebutlah yang harus mendapat perhatian semua pihak. Rekomendasi-rekomendasi yang digulirkan tentunya mengacu pada sub-sub indikator yang lemah tersebut. Bagian yang tidak kalah pentingnya adalah menemukan sekolah-sekolah yang data mutunya rendah pada masing-masing sub indikator penyumbang rendahnya rapor mutu di tingkat kabupaten. Untuk selanjutnya merekalah yang paling tepat menindaklanjuti rekomendasi yang ditawarkan. Ini sebagai bagian dari upaya menelorkan rekomendasi yang kritis, spesifik, operasional, dan tepat sasaran.

B. Dasar Hukum

Setiap rencana kegiatan yang dibuat tentunya memerlukan dasar pertimbangan dan landasan hukum yang jelas agar tidak salah langkah dalam pelaksanaannya. Adapun dasar hukum dari penyusunan buku penjaminan mutu pendidikan ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

- Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemic Corona Virus Desease 2019;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 12. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 Tanggal 16 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020;

C. Tujuan

Setiap aktivitas yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang jelas. Demikian pula penyusunan buku peta mutu pendidikan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk melakukan analisis data mutu dan penyusunan rekomendasi secara lebih kreatif, objektif, dan tepat sasaran.
2. Untuk memberikan laporan dan penyebarluasan hasil analisis data dan rekomendasi secara berkala dalam bentuk buku yang dapat dipublikasikan secara luas.
3. Untuk mendokumentasikan hasil analisis data dan rekomendasi secara permanen, baik dalam buku cetak maupun buku elektronik (*e-book*).
4. Untuk memberi kesempatan kepada TPMPD mengembangkan kreativitasnya dalam menyusun karya tulis berupa laporan secara ilmiah.

D. Manfaat

Manfaat yang dapat dipetik dari kegiatan ini dapat dibedakan berdasarkan kapasitas dari masing-masing pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan.

1. Kepada pemerintah pusat dan daerah diharapkan menggunakan substansi buku ini sebagai pertimbangan dalam melakukan kebijakan dalam bidang pendidikan baik dalam skala nasional (secara proporsional) maupun pada lingkup daerah.
2. Kepada TPMPD diharapkan memahami substansi buku ini secara komprehensif dan selanjutnya melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait.
3. Kepada para pengawas sekolah diharapkan menjadikan buku ini sebagai salah satu acuan dalam melakukan arah pembinaan di sekolah yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Kepada satuan pendidikan diharapkan menjadikan isi buku ini sebagai cermin atau potret diri dalam rangka melakukan peningkatan mutu pelayanan di sekolah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

A. Progres Pengiriman Data Dapodik

1. Pemahaman tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Dapodik adalah singkatan dari Data Pokok Pendidikan yaitu sebuah sistem pendataan yang digunakan untuk menjangkau semua data terkait data kelembagaan kurikulum sekolah, data siswa, data pendidik dan tenaga kependidikan, serta data sarana dan prasarana setiap sekolah. Data Dapodik menjangkau seluruh sekolah di Indonesia bahkan hingga sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Pendataan ini sebenarnya sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2006, namun karena beberapa kali prosesnya mengalami kendala, termasuk pada tahun 2008 terjadi pengalihan tugas pengelola. Awalnya dikelola oleh PSP Balitbang Depdiknas lalu didelegasikan kepada masing-masing dinas pendidikan tingkat provinsi, kota dan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dibawah pengawasan Biro PKLN Depdiknas.

Setelah terjadi perubahan dalam internal kementerian termasuk perubahan nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tahun 2012 Dapodik dilanjutkan eksistensi oleh PDSP Kemdikbud RI. Ini menjadi titik awal reformasi sistem pendataan dapodik yang terus berkembang hingga saat ini. Kini, dapodik telah menjadi satu-satunya acuan data yang digunakan Kemdikbud dalam setiap kebijakan-kebijakannya baik yang terkait dengan biaya operasional sekolah (BOS), bantuan-bantuan sarana dan prasarana, hingga tunjangan-tunjangan guru dan kebijakan lainnya mengacu pada data yang dikirim oleh Operator Dapodik ini.

Setiap tahunnya fungsi dapodik akan terus menerus mengalami perkembangan berkaitan dengan perubahan suatu kebijakan serta program yang dicanangkan oleh

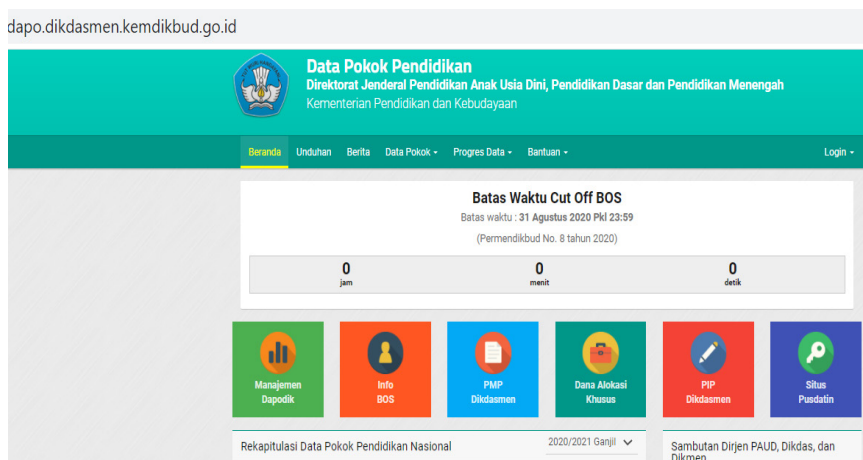
Kemdikbud. Saat ini dapodik memiliki beberapa fungsi untuk antara lain :

1. Memberikan alokasi dana bantuan operasional sekolah sesuai dengan jumlah siswa pada suatu instansi atau sekolah.
2. Memberikan alokasi kuota penerimaan tunjangan–tunjangan bagi guru yang sudah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.
3. Alokasi bantuan sarana dan prasarana bagi sekolah dimana fasilitasnya masih belum memadai.
4. Pengajuan serta upaya perbaikan data kelembagaan sekolah.
5. Pengajuan dan verval (verifikasi dan validasi) data dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau NUPTK.
6. Program pengajuan dan verval data bagi peserta didik serta nomor induk siswa nasional (NISN).
7. Pengajuan sekaligus upaya Verval data yang berkaitan dengan satuan pendidikan serta Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
8. Program pemetaan dan pemerataan guru.
9. Monitoring serta evaluasi tentang berbagai macam kebijakan dan program–program yang sudah ditetapkan oleh Kemdikbud.
10. Mempercepat dan membantu dalam upaya peningkatan efektivitas pelaporan yang sudah dilakukan dari sekolah menuju ke kementerian serta mengurangi adanya resiko penyimpangan atau resiko pelanggaran atas apa yang sudah ada sebelumnya.

2. Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang SMP Provinsi Bali pada Data Dapodik

Bagi sekolah dan operator dapodik untuk mengakses dapodik sudah tidak asing bagi mereka. Tapi bagi orang awam dapat mengakses dapodik pada laman berikut: <https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> Adapun tampilan websitenya sebagai berikut.

Gambar 2.1 Laman Dapo Dikdasmen Kemdikbud



Berdasarkan data yang dapat dicari pada laman tersebut dapat diketahui jumlah sekolah negeri dan swasta di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga melalui laman tersebut dapat ditemukan semua sekolah baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Buleleng untuk semua jenjang SMP pada tahun 2021 seperti pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

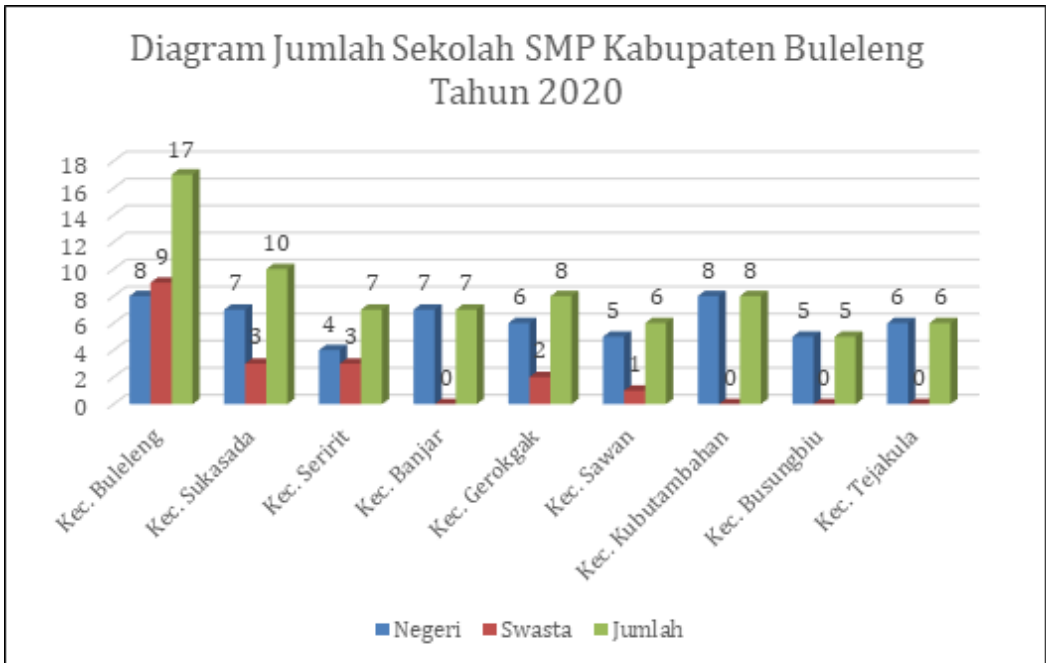
No	Wilayah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kec. Buleleng	8	9	17
2	Kec. Sukasada	7	3	10
3	Kec. Seririt	4	3	7
4	Kec. Banjar	7	0	7
5	Kec. Gerokgak	6	2	8
6	Kec. Sawan	5	1	6
7	Kec. Kubutambahan	8	0	8
8	Kec. Busungbiu	5	0	5
9	Kec. Tejakula	6	0	6
Total		56	18	74

<https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/>, diunduh tanggal 25-06-2021 pukul 10.35.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah satuan pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Buleleng sebanyak 74 (tujuh puluh empat). Dengan rincian SMP negeri sebanyak 56 (lima puluh enam) sekolah dan SMP swasta sebanyak 18 (delapan belas) sekolah. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, jumlah terbanyak ada di Kecamatan Buleleng yaitu sebesar 17 (tujuh belas) sekolah dan yang paling sedikit di Kecamatan Sawan dan Busungbiu masing-masing dengan jumlah 5 (lima) sekolah, dan di Kecamatan Banjar, Kubutambahan, Tejakula, dan Busungbiu tidak terdapat sekolah swasta. Pada data tersebut juga dinyatakan bahwa SMP swasta hanya ada di Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Seririt, Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Sawan. Jika dilihat perkembangan jumlah sekolah, dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan jumlah sekolah. Hal ini disebabkan ada sekolah yang “tutup”, yaitu: SMP Bhaktiyasa Singaraja dan SMP Dharma Sastra Umejero. Ada juga sekolah berubah status, yaitu SMP Dharma Putra Sangsit berubah menjadi SMP N 4 Sawan.

Untuk lebih jelasnya, jumlah sekolah jenjang SMP di Kabupaten Buleleng digambarkan pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar 2.2 Grafik Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020



<https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres/1/220000> update 26/06/2021 : 11:05

3. Progres Pengiriman Data Dapodik

Untuk mendapatkan data tentang satuan pendidikan secara nasional, sekolah wajib melakukan pembaharuan data dapodik sesuai regulasi yang berlaku. Data Dapodik diperbaharui oleh operator Dapodik sekolah pada aplikasi yang telah di-*upgrade*. Data tentang progres pengiriman data dapodik secara nasional maupun daerah untuk jenjang SMP diakses melalui laman [dapo.dikdasmen](https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id) per-tanggal 22/06/2021 pukul 10:54. Berdasarkan laman tersebut data yang diperoleh adalah sebagai berikut: dari 9 (sembilan) kabupaten/kota yang ada di Bali, 6 (enam) kabupaten/kota yaitu: Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kota Madya Denpasar memiliki progres pengiriman sebesar 100% (seratus persen). Sedangkan 3 (tiga) kabupaten lainnya masih di bawah 100% antara lain: Kabupaten Bangli 96% (Sembilan puluh enam persen), Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Badung sebesar 95% (sembilan puluh lima persen). Gambaran progress pengiriman data Dapodik Provinsi Bali tahun 2021 disajikan pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SMP Provinsi Bali Tahun 2020

No	Wilayah	Total Sekolah	Total Kirim	Total Sisa	%
1	Kab. Buleleng	74	74	0	100%
2	Kab. Gianyar	41	41	0	100%
3	Kab. Karangasem	48	48	0	100%
4	Kab. Klungkung	22	22	0	100%
5	Kab. Tabanan	40	40	0	100%
6	Kota Denpasar	70	70	0	100%
7	Kab. Bangli	29	28	1	96%
8	Kab. Jembrana	24	23	1	95%
9	Kab. Badung	67	64	3	95%
Total		415	410	5	98,80%

<https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres/1/220000> update 9/10/2020 11:09:00

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dinyatakan bahwa dari 415 (empat ratus lima belas) sekolah jenjang SMP di Provinsi Bali, sebanyak 410 (empat ratus sepuluh) sekolah atau 98,80% telah mengirim dan memperbaharui data Dapodiknya. Sedangkan 3 sekolah lainnya yaitu : berasal dari Kabupaten Bangli (1 sekolah), Kabupaten Jembrana (1 sekolah) dan Kabupaten Badung (3 sekolah) belum melakukan pembaharuan data Dapodik.

Jika perhatian difokuskan pada Kabupaten Buleleng, maka dapat dilihat progres pengiriman data per kecamatan dan per sekolah. Tabel 1.3 berikut ini menunjukkan Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SMP di Kabupaten Buleleng tahun 2020.

Tabel 1.3 Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

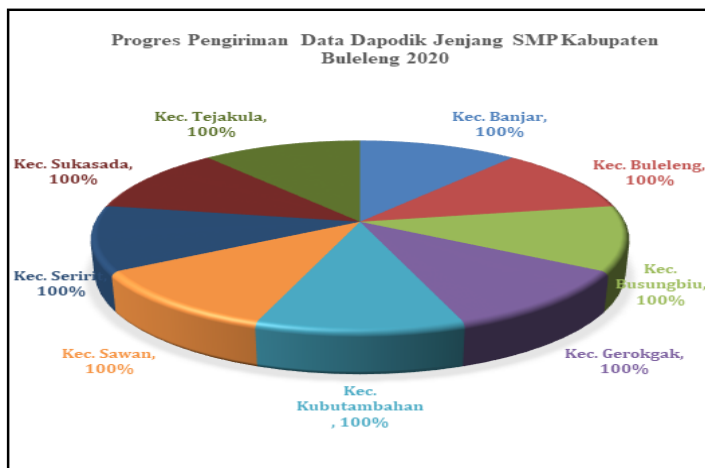
No	Wilayah	Total Sekolah	Total Kirim	Total Sisa	%
1	Kec. Banjar	7	7	0	100%
2	Kec. Buleleng	17	17	0	100%

3	Kec. Busungbiu	5	5	0	100%
4	Kec. Gerokgak	8	8	0	100%
5	Kec. Kubutambahan	8	8	0	100%
6	Kec. Sawan	6	6	0	100%
7	Kec. Seririt	7	7	0	100%
8	Kec. Sukasada	10	10	0	100%
9	Kec. Tejakula	6	6	0	100%
Total		74	74	0	100%

<https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres-smp/2/220100>, diunduh tanggal 30-06-2021, pukul: 07.37.

Dari tabel 1,3 di atas dapat dilihat bahwa progres pengiriman data dapodik jenjang SMP di Kabupaten Buleleng mencapai 100%. Ini berarti seluruh sekolah jenjang SMP di Kabupaten Buleleng telah memperbaharui dan mengirim data Dapodiknya. Dengan diperbaharui dan terkirimnya data Dapodik jenjang SMP di Kabupaten Buleleng, maka seluruh data pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Buleleng sudah terdata di sistem data pokok pendidikan. Semoga data tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin untuk membantu sekolah meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian mewujudkan satuan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Buleleng sebagai visi pendidikan Kabupaten Buleleng dapat terwujud. Gambaran progress pengiriman data Dapodik jenjang SMP Kabupaten Buleleng tahun 2020 disajikan pada gambar 1.3 tentang Progres pengiriman data dapodik jenjang SMP Kabupaten Buleleng tahun 2020 sebagai berikut.

Gambar 2.3 Grafik Progres Pengiriman Data Dapodik SMP Kabupaten Buleleng



<https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres-smp/2/220100>, diunduh tanggal 30-06-2021, pukul: 07.37.

B. Progres Pengiriman, Hitung Rapor dan Olah Rapor Data PMP

1. Deskripsi Data PMP

Pemerintah mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan untuk mendukung proses pemetaan mutu pendidikan yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia, Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan sekolah.

Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa siklus kegiatan pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi: (1) membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan dan (2) memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan pada Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPME dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) disusun mengacu delapan standar nasional pendidikan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Demikian juga dengan instrumen akreditasi yang disusun oleh Badan Akreditasi Nasional dengan mengacu pada peraturan terkait. Instrumen ini dibuat sebagai dasar untuk melakukan evaluasi diri sekolah yang selanjutnya akan digunakan untuk proses pemetaan mutu. Pemetaan mutu adalah proses terkait kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan dari mulai tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Pemetaan ini dapat memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan.

Proses pemetaan mutu pendidikan diawali dengan penyusunan, dilanjutkan dengan pengisian instrumen oleh responden di tingkat satuan pendidikan. Pengisian instrumen melibatkan seluruh pemangku kepentingan sekolah seperti pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, peserta didik dan komite sekolah sebagai perwakilan orang tua peserta didik. Instrumen yang telah diisi diinput oleh operator sekolah pada aplikasi PMP. Pengawas sekolah melakukan validasi dan verifikasi data PMP yang diinput oleh operator untuk memastikan data mutu PMP sesuai dengan realitas yang ada di sekolah. Sekolah mengirim, menghitung sendiri rapor mutunya, kemudian oleh sistem dilakukan sinkronisasi dengan data Dapodik sehingga keluar data rapor mutu. Jadi munculnya rapor mutu berdasarkan proses pengiriman, penghitungan dan pengolahan data responden sekolah.

Pemetaan dilakukan sebagai salah satu tahapan dalam menjalankan penjaminan mutu pendidikan baik secara internal maupun eksternal. Pemetaan ini akan menghasilkan peta mutu pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat sebagai acuan dalam perencanaan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai kewenangan masing-masing. Setelah proses pengisian instrumen evaluasi diri sekolah melalui instrumen PMP, maka capaian progres dan hasilnya dapat diakses pada laman manajemen PMP Provinsi Bali. Adapun laman dimaksud adalah <http://manajemen.pmp.kemdikbud.go.id/beranda> dengan username 220000@pmp.dikdasmen dan passwordnya adalah 220000. Tampilan halaman depan laman Manajemen PMP disajikan pada gambar 1.4 berikut.

Gambar 2.4 Laman Manajemen PMP Kemdikbud



<http://manajemen.pmp.kemdikbud.go.id/progres-pengiriman>, 9/10/2020 11:10

2. Progres Pengiriman Data PMP Provinsi Bali Tahun 2020

Progres pengiriman data PMP Provinsi Bali pada pada jenjang SMP dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4 Progres Pengiriman data PMP jenjang SMP Provinsi Bali tahun 2020

No	Kabupaten	Total Sekolah	Total Kirim	Total Sisa	%
1	Kab. Karangasem	48	48	0	100.00%
2	Kab. Klungkung	22	22	0	100.00%
3	Kab. Jembrana	24	24	0	100.00%
4	Kab. Buleleng	77	75	2	97.40%
5	Kab. Tabanan	40	40	0	100.00%
6	Kab. Gianyar	41	40	1	97.56%
7	Kab. Badung	60	59	1	98.33%
8	Kota Denpasar	62	60	2	96.77%
9	Kab. Bangli	29	25	4	86.21%
TOTAL		403	393	10	97.50%

Diolah dari <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> dan <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> data per 22 Juni 2021

Tabel 1.4 secara jelas memperlihatkan bahwa **dari 403 SMP/MTS di Provinsi Bali** yang telah melakukan pengiriman data PMP sebanyak 393 sekolah atau 97,50%. Artinya masih ada 2,50% atau 10 (sepuluh) sekolah yang belum mengirim data. Kabupaten Bangli penyumbang terbanyak dengan 4 (empat) sekolah, Kabupaten Buleleng dan Kota Madya Denpasar masing-masing 2 (dua) sekolah serta Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung masing-masing 1 (satu) sekolah. Sementara 4 (empat) Kabupaten lain seperti Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan seluruh sekolah jenjang SMP sudah mengirim data PMP.

Jika perhatian difokuskan pada Kabupaten Buleleng, sekolah yang telah melakukan pengiriman data PMP sebanyak 73 sekolah dari 74 sekolah yang ada. Ada 1 sekolah yang tercatat belum tuntas melakukan pengiriman data PMP, yaitu SMP Saraswati Singaraja. Sekolah ini berada di Kecamatan Buleleng bahkan di Jantung Kota Singaraja. Ini tampak menarik karena sekolah di luar kota dapat melakukan pengiriman data secara tuntas tetapi sekolah yang berada di Jantung kota tidak berhasil melakukan pengiriman data. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan yang bersifat non teknis dimana antara kepala sekolah dengan operator sekolah sempat mengalami gangguan hubungan komunikasi (*communication relationship disorder*).

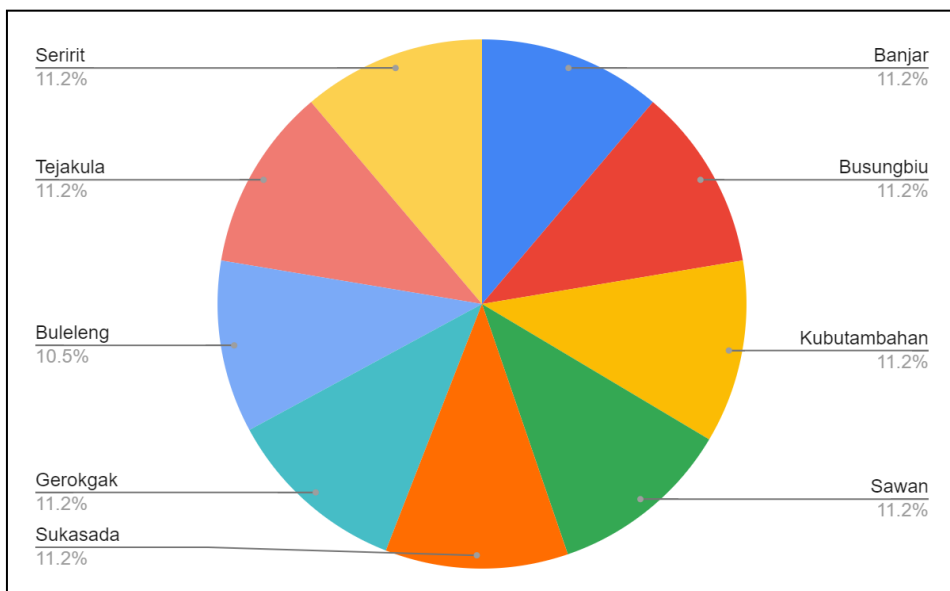
Tabel 1.5 Progres Pengiriman Data PMP jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

No	Kabupaten	Total Sekolah	Total Kirim	Total Sisa	%
1	Kec. Banjar	7	7	0	100.00%
2	Kec. Busungbiu	5	5	0	100.00%
3	Kec. Kubutambahan	8	8	0	100.00%
4	Kec. Sawan	6	6	0	100.00%
5	Kec. Sukasada	10	10	0	100.00%
6	Kec. Gerokgak	8	8	0	100.00%
7	Kec. Buleleng	17	16	1	94.12%
8	Kec. Tejakula	6	6	0	100.00%
9	Kec. Seririt	7	7	0	100.00%
TOTAL		74	73	1	98.65%

Diolah dari <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> dan <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> data per 22 Juni 2021

Sebagai gambaran umum progres pengiriman data PMP jenjang SMP tahun 2020 disajikan pada gambar 1.5 berikut.

Gambar 2.5 Grafik Capaian Progres Pengiriman Rapor Mutu Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020



Diolah dari <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> dan <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> data per 22 Juni 2021

2. Progres Hitung Rapor Mutu PMP Provinsi Bali Tahun 2020

Setelah melihat progres pengiriman langkah berikutnya adalah mencermati progres hitung rapor PMP. Progres hitung rapor mutu dapat dilihat pada laman PMP sebagai dan disajikan pada Tabel 1.6 berikut.

Tabel 1.6 Capaian Progres Hitung Rapor Jenjang SMP Tingkat Provinsi Bali Tahun 2020

No	Wilayah	SMP			
		Jumlah	Hitung Rapor	Sisa	%
1	Kab. Karangasem	48	48	0	100.00%
2	Kab. Badung	67	57	10	85.07%
3	Kab. Klungkung	22	22	0	100.00%
4	Kab. Gianyar	41	33	8	80.49%
5	Kab. Tabanan	40	32	8	80.00%
6	Kab. Buleleng	74	72	2	97.30%
7	Kota Denpasar	69	52	17	75.36%
8	Kab. Bangli	29	22	7	75.86%
9	Kab. Jembrana	24	20	4	83.33%
Total		403	358	56	86.47%

Diolah dari <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> dan <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> data per 22 Juni 2021

Dari tabel 1.6 dapat dijelaskan bahwa progres hitung rapor untuk Provinsi Bali pada jenjang SMP sebesar 86,47%. Progres tertinggi dicapai oleh Kabupaten Karangasem dan Klungkung yang mencapai progres 100%. Untuk Kabupaten Buleleng sebanyak 97,30% sekolah telah melewati proses hitung. Data progres hitung rapor mutu khusus untuk Kabupaten Buleleng disajikan pada data tabel 1.7 berikut.

Tabel 1.7 Progres Hitung Rapor Mutu SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

No	Kabupaten	Total Sekolah	Total Hitung	Total Sisa	%
1	Kec. Banjar	7	7	0	100.00%
2	Kec. Busungbiu	5	5	0	100.00%
3	Kec. Kubutambahan	8	8	0	100.00%
4	Kec. Sawan	6	6	0	100.00%
5	Kec. Sukasada	10	10	0	100.00%
6	Kec. Gerokgak	8	7	1	87.50%
7	Kec. Buleleng	17	16	1	94.12%
8	Kec. Tejakula	6	6	0	100.00%
9	Kec. Seririt	7	7	0	100.00%
TOTAL		74	72	2	97.29%

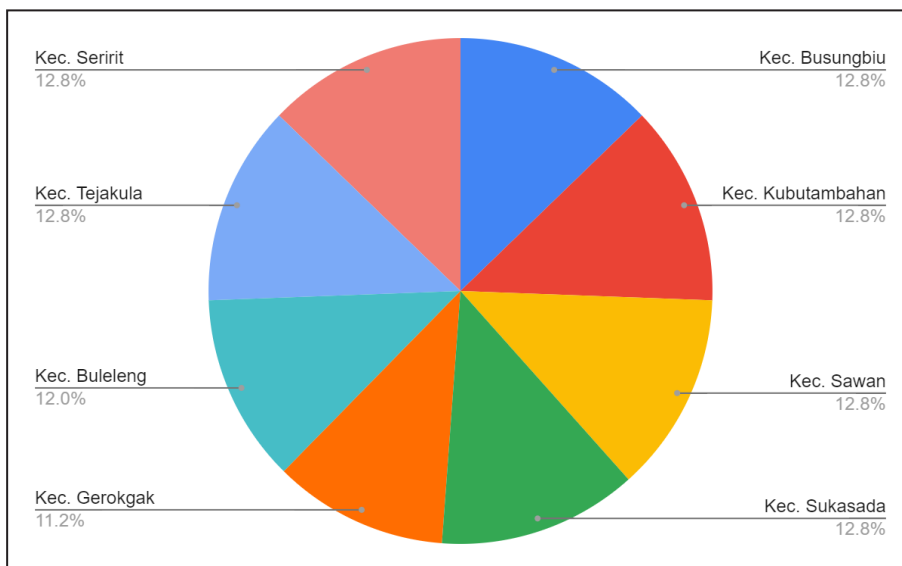
Diolah dari <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> dan <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> data per 22 Juni 2021

Data tabel 1.7 menunjukkan bahwa 7 kecamatan memiliki ketercapaian hitung rapor mutu sebesar 100%, hanya 2 kecamatan yang di bawah 100%, yaitu: Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Buleleng. Walaupun kedua kecamatan ini masing-masing menyisakan 1 sekolah yang belum mencapai progres hitung, namun persentase terendah dimiliki oleh Kecamatan Gerokgak, yaitu sebesar 87,50%,

Penelusuran data lebih lanjut menemukan 2 sekolah yang belum melakukan proses hitung rapor mutu 2020 adalah SMPN Satap 1 Gerokgak dan SMP Saraswati Singaraja. Sebagai tindak lanjut terhadap hal tersebut, maka dilakukan koordinasi antara Disdikpora Kabupaten Buleleng dengan pengawas satuan pendidikan masing-masing sekolah untuk segera melakukan proses penghitungan rapor mutu PMP dan mengirim data ke aplikasi PMP pusat.

Data tentang progres hitung rapor mutu jenjang SMP Kabupaten Buleleng tahun 2020 disajikan dalam bentuk diagram lingkaran seperti gambar 1.6 berikut.

Gambar 2.6 Grafik Capaian Progres Hitung Rapor Mutu Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020



Diolah dari <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> dan <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> data per 22 Juni 2021

4. Progres Olah Rapor Mutu PMP Jenjang SMP Provinsi Bali Tahun 2020

Bagian terakhir dari analisis data PMP ini adalah mengolah data PMP menjadi rapor mutu. Meskipun sekolah telah berhasil menghitung rapor mutu, tetapi rapor mutunya belum kunjung muncul yang disebabkan oleh berbagai kendala. Dengan demikian rapor mutu yang muncul ini kita sebut sebagai data yang sudah terolah. Tabel 1.8 menunjukkan Progres Olah Rapor mutu jenjang SMP Provinsi Bali tahun 2020. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum capaian Provinsi Bali sebesar 85,02% dengan 62 (enam puluh dua) sekolah yang belum melewati olah rapor mutu. Kabupaten Karangasem dan Klungkung memiliki capaian olah rapor mutu tertinggi yaitu 100%, capaian terendah berada pada Kota Denpasar sebesar 73,91%. Jumlah sekolah yang rapor mutunya belum terolah disumbangkan oleh Kabupaten Buleleng sejumlah 2 sekolah, Kota Madya Denpasar 18 sekolah, Badung 14 sekolah, Bangli 7 sekolah, Jembrana 5 sekolah serta Tabana dan Gianyar masing-masing 8 sekolah.

Tabel 1.8 Progres Olah Rapor Mutu Jenjang SMP Provinsi Bali Tahun 2020

No	Wilayah	SMP			
		Jumlah	Olah Rapor	Sisa	%
1	Kab. Karangasem	48	48	0	100.00%
2	Kab. Badung	67	53	14	79.10%
3	Kab. Klungkung	22	22	0	100.00%
4	Kab. Gianyar	41	33	8	80.49%
5	Kab. Tabanan	40	32	8	80.00%
6	Kab. Buleleng	74	72	2	97.30%
7	Kota Denpasar	69	51	18	73.91%
8	Kab. Bangli	29	22	7	75.86%
9	Kab. Jembrana	24	19	5	79.17%
Total		414	352	62	85.02%

Diolah dari <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> dan <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> data per 22 Juni 2021

Data tentang jumlah rapor mutu yang telah terolah oleh server pusat, khusus untuk Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 1.9. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Buleleng capaian rapor mutu sekolah yang telah diolah sebanyak 72 sekolah atau sebesar 97,29%. Hanya 2 sekolah yang belum mencapai progres olah rapor mutu, yaitu 1 sekolah di Kecamatan Buleleng dan 1 sekolah di Kecamatan Gerokgak.

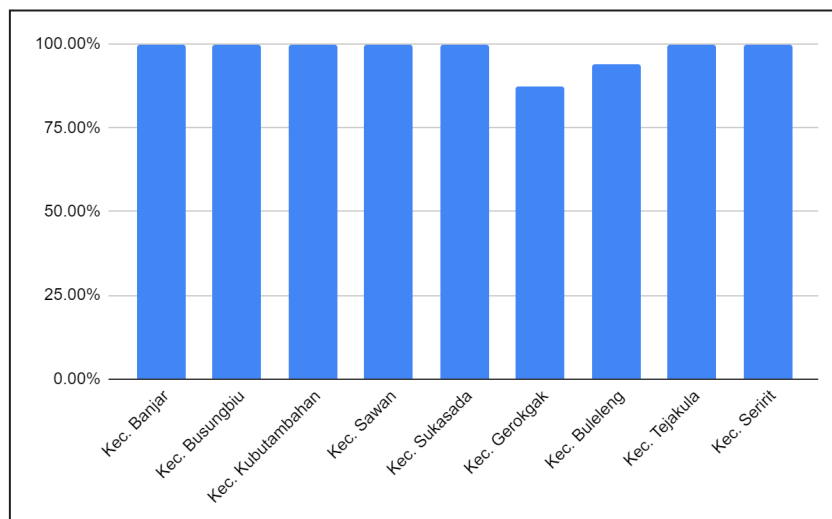
Tabel 1.9 Progres Olah Rapor Mutu SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

No	Kabupaten	Total Sekolah	Total Olah	Total Sisa	%
1	Kec. Banjar	7	7	0	100.00%
2	Kec. Busungbiu	5	5	0	100.00%
3	Kec. Kubutambahan	8	8	0	100.00%
4	Kec. Sawan	6	6	0	100.00%
5	Kec. Sukasada	10	10	0	100.00%
6	Kec. Gerokgak	8	7	1	87.50%
7	Kec. Buleleng	17	16	1	94.12%
8	Kec. Tejakula	6	6	0	100.00%
9	Kec. Seririt	7	7	0	100.00%
TOTAL		74	72	2	97.29%

Diolah dari <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> dan <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> data per 22 Juni 2021

Untuk lebih mudahnya memperoleh gambaran perbandingan prosentase tentang progres olah rapor mutu sekolah pada masing-masing kecamatan, berikut disajikan dalam bentuk tampilan grafik batang.

Gambar 2.7 Grafik Capaian Progres Olah Rapor Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020



Diolah dari <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> dan <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> data per 22 Juni 2021

5. Rekapitulasi data PMP yang terkirim, terhitung dan terolah Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

Untuk memudahkan melakukan pendampingan, fasilitasi dan tindak lanjut terhadap capaian data mutu PMP, perlu dibuat rekapitulasi keseluruhan data PMP yang menyangkut data yang terkirim, terhitung dan terolah serta persentasenya masing-masing. Adapun rekapitulasi data dimaksud untuk untuk SMP/MTS di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.10 Rekapitulasi data PMP yang terkirim, terhitung dan terolah
Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020**

No	Hasil Identifikasi	Jumlah Sekolah	Persentase
1	Jumlah Sekolah	74	-
2	Terkirim	73	98.65%
3	Belum terkirim	1	1.35%
4	Terhitung	72	97.29%
5	Belum terhitung	2	2.70%
6	Terolah	72	97.29%
7	Belum terolah	2	2.70%

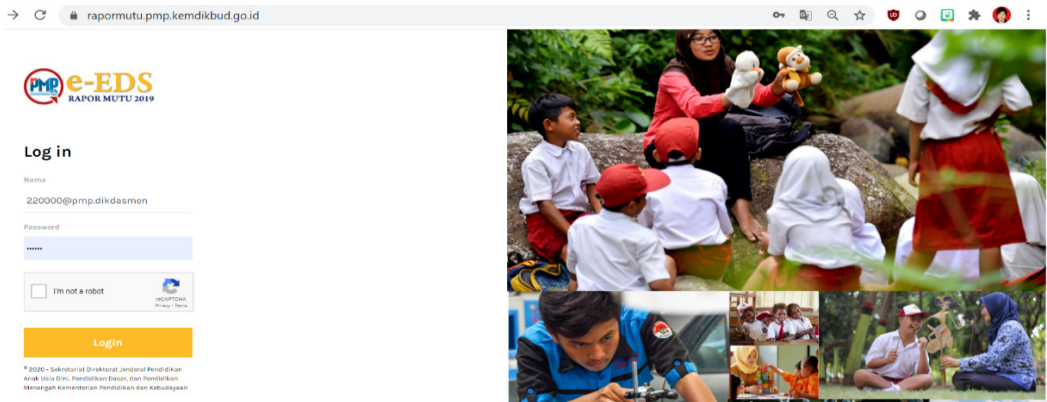
Berdasarkan tabel 1.10 tersebut di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Dari segi jumlah sekolah, dapat dikatakan bahwa dari 74 sekolah pada tahun 2020, yang telah melakukan pengiriman data PMP sebanyak 73 sekolah. Dari 73 sekolah yang data PMP-nya telah terkirim, 72 sekolah sudah melakukan penghitungan rapor mutu. Sekolah yang telah melakukan penghitungan rapor mutu tersebut, seluruhnya telah terbit rapor mutunya. Dapat disimpulkan bahwa dari 72 sekolah jenjang SMP di Kabupaten Buleleng memiliki rapor mutu tahun 2020.
2. Dari segi capaian persentase dapat dikatakan bahwa dari 74 sekolah jenjang SMP di Kabupaten Buleleng, sebanyak 98,65% melakukan pengiriman data mutu pendidikan, 97,29% telah melakukan proses hitung, serta 97,29% juga telah melakukan proses olah dan selanjutnya terbit rapor mutunya.

C. Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Buleleng

Seperti dalam analisis data PMP tahun-tahun sebelumnya, data mutu akan diolah dan dideskripsikan dengan bersumber pada laman rapor mutu. Pada data mutu tahun 2020 rapor mutu secara lengkap selama 5 tahun dapat diakses pada alamat berikut: <https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> dengan tampilan laman-nya sebagai berikut.

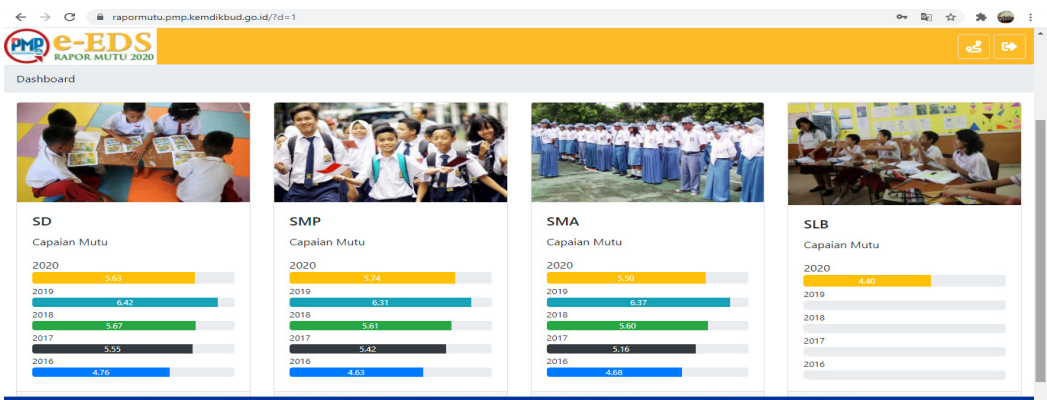
Gambar 2.8 Laman Rapor Mutu Dikdasmen Kemdikbud Tahun 2020



<https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> 10/09/2020 18:45

Setelah tampil halaman muka tersebut, langkah selanjutnya dapat melakukan *login* dengan akun admin LPMP yaitu: 220000@pmp.dikdasmen dan passwordnya adalah 220000. Untuk menemukan data mutu kabupaten/kota/provinsi ketika pada wilayah itu, cukup ketik 3 huruf maka akan muncul nama-nama sekolah yang bersesuaian namanya dengan 3 huruf tersebut, lalu pilih sekolah yang diinginkan.

Gambar 2.9 Laman Rapor Mutu Dikdasmen Kemdikbud Provinsi Bali Tahun 2020



<https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> 10/09/2020 18:45

Berdasarkan data yang diperoleh dari laman rapor mutu dapat ditampilkan data capaian mutu pada SNP dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 untuk jenjang SMP Provinsi Bali seperti pada tabel 1.11. Jika dilakukan analisis data pada tabel tersebut dapat diuraikan bahwa terjadi peningkatan rerata capaian mutu SNP yang berkelanjutan dari tahun 2016 sampai tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan. Rerata capaian SNP tahun 2016 mencapai 4,62 dengan kategori menuju SNP 3, pada tahun 2017 menjadi 5,41 dengan kategori menuju SNP 4 dan meningkat kembali tahun 2018 sebesar 5,55 dengan kategori menuju SNP 4 serta meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 6,57 dengan kategori menuju SNP 4. Sayangnya pada tahun 2020 terjadi penurunan pada beberapa standar. Ini tentu saja disebabkan oleh kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran dan aktivitas lainnya secara tatap muka / berkerumun di sekolah.

Beberapa indikator dan sub indikator yang tersebar pada beberapa standar nasional pendidikan perlu perhatian khusus karena capaian data mutunya sangat rendah. Untuk meningkatkan capaian data mutu beberapa indikator dan sub indikator tersebut tentu memerlukan strategi yang sesuai, seperti berkolaborasi antar pemangku kepentingan. Dalam hal ini semua pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Sebelum mencermati capaian mutu SNP untuk SMP di Kabupaten Buleleng, sebagai bahan perbandingan perlu disimak terlebih dahulu capaian mutu SNP sekolah di tingkat provinsi. Berikut ini disajikan capaian mutu SNP jenjang SMP pada tingkat Provinsi Bali.

Tabel 1.11 Tabel Capaian Mutu SNP Jenjang SMP Provinsi Bali Tahun 2016 - 2020

No	Standar Nasional Pendidikan	Provinsi Bali				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Standar Kompetensi Lulusan	5.38	5.81	6.50	6.98	6.03
2	Standar isi	4.85	5.53	5.96	6.95	5.69
3	Standar Proses	5.17	6.25	6.61	6.97	5.50
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.50	6.00	6.27	6.98	6.05
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.50	4.33	3.27	5.67	6.24
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.57	4.16	3.93	5.12	4.92

7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.73	5.67	6.05	6.90	5.87
8	Standar Pembiayaan	4.27	5.54	5.83	6.95	5.62
Rerata Capaian seluruh Standar		4.62	5.41	5.55	6.57	5.74

<https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> 10/09/2020 18:45, diunduh tanggal 30-06-2021 pukul 10.35.

Pada tabel tersebut di atas, jelas memperlihatkan bahwa capaian mutu SNP 2020 mengalami penurunan untuk semua standar dibandingkan tahun 2019. Bagaimana halnya dengan kondisi di Kabupaten Buleleng? Data capaian mutu pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Buleleng dapat dicermati pada tabel 1.12 di bawah ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2019 capaian mutu ada kecenderungan naik, tetapi tahun 2020 terjadi penurunan. Rerata capaian tahun 2016 sebesar 4,56 dengan kategori menuju SNP 3 menjadi 5,41 pada tahun 2017 dengan kategori menuju SNP 4. Di tahun 2018 sebesar 5,55 dengan kategori menuju SNP 4 dan meningkat lagi pada tahun 2019 sebesar 6,57 dengan kategori menuju SNP 4. Tahun 2020 terjadi penurunan nilai rata-rata, yaitu sebesar 5,74, walaupun kategorinya masih sama menuju SNP 4.

Berdasarkan kajian lebih mendalam, jika dilihat per standar rata-rata standar memiliki capaian mutu menuju SNP 4, tetapi jika dilihat per indikator dan sub indikator capaian mutunya tampak sangat variatif. Variatif di sini maksudnya ada yang mencapai bintang 5 dengan skor maksimal (yaitu 7) dan ada pula hanya bintang 1 dengan skor sangat rendah.

Tabel 1.12 Tabel Capaian Mutu SNP Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2016 - 2020

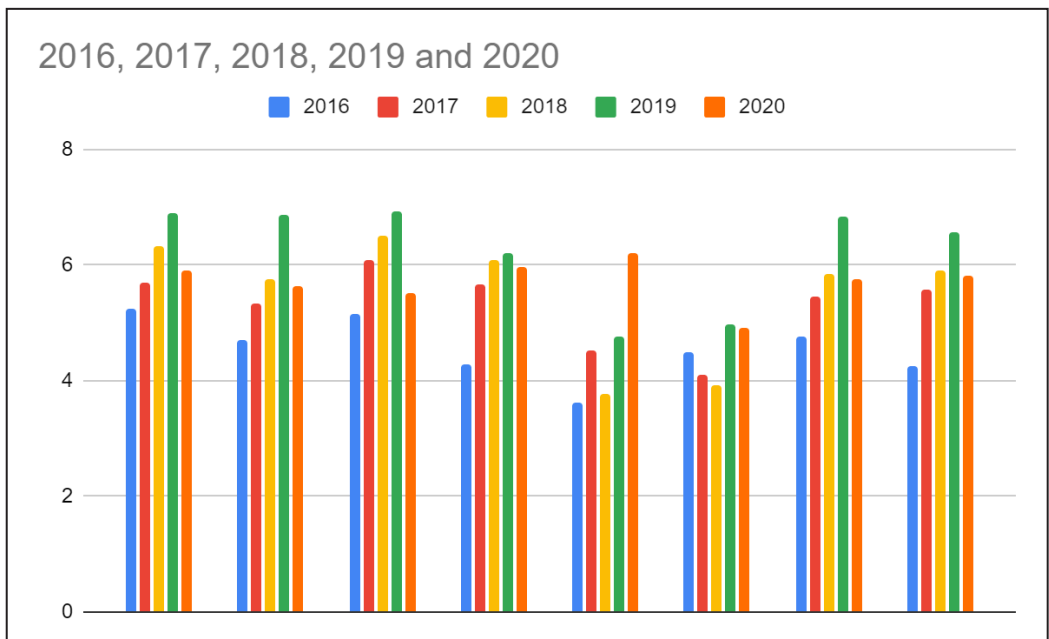
No	Standar Nasional Pendidikan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Standar Kompetensi Lulusan	5.26	5.69	6.33	6.9	5.90
2	Standar Isi	4.69	5.33	5.77	6.88	5.63
3	Standar Proses	5.16	6.1	6.5	6.92	5.52
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.27	5.66	6.1	6.22	5.97
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.62	4.53	3.78	4.76	6.22
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.49	4.1	3.91	4.96	4.91
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.76	5.46	5.85	6.85	5.75
8	Standar Pembiayaan	4.26	5.58	5.91	6.57	5.82

<https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> pada 22/06/2021 jam 10.30 wita

Pada tabel di atas tampak jelas bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan hampir pada semua standar. Hanya pada standar pendidik dan tenaga kependidikan yang mengalami kenaikan pada tahun 2020, yaitu dari 4.76 pada tahun 2019 menjadi 6.22 pada tahun 2020.

Untuk lebih memudahkan melihat gambaran tentang perbandingan capaian mutu SNP jenjang SMP Kabupaten Buleleng pada beberapa tahun terakhir berikut disajikan dalam bentuk diagram radar. Perhatikan gambar 1.10 berikut.

Gambar 2.10 Perbandingan Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Buleleng dari Tahun 2016 Sampai Tahun 2020



<https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> pada 7/10/2020 jam 11.30 wita

Dari gambar 1.10 dapat dilihat dengan jelas bahwa terjadi penurunan capaian SNP pada tahun 2018 pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan. Tetapi secara signifikan terjadi peningkatan pada seluruh Standar pada tahun 2019. Hal terjadi sebaliknya pada tahun 2020. Untuk mengetahui kategori capaian mutu SNP berikut adalah tabel tentang kategori capaian mutu SNP.

Tabel 1.13 Kategori Capaian Mutu SNP

No	Level	Kategori	Rentang Nilai
1	Bintang 1	Menuju SNP 1 (M1)	0,00 → 2,04
2	Bintang 2	Menuju SNP 2 (M2)	2,05 → 3,70
3	Bintang 3	Menuju SNP 3 (M3)	3,71 → 5,06
4	Bintang 4	Menuju SNP 4 (M4)	5,07 → 6,66
5	Bintang 5	SNP	6,67 → 7,00

Untuk melihat banyaknya sekolah yang berada pada posisi Menuju SNP 1, SNP 2, SNP 3, SNP 4 serta SNP di Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.14 Data Capaian Level Mutu SNP Jenjang SMP Tahun 2016-2020

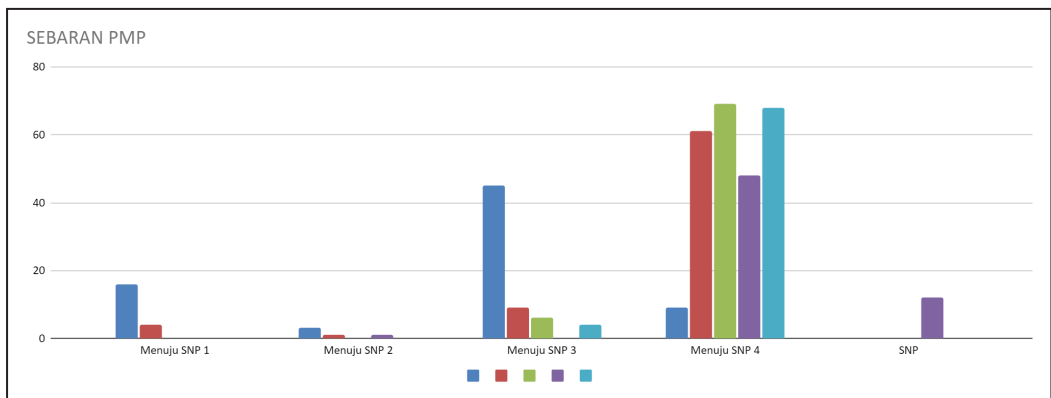
No	Indikator Capaian	Jumlah sekolah/Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Menuju SNP 1 (M1)	16	4	0	0	0
2	Menuju SNP 2 (M2)	3	1	0	1	0
3	Menuju SNP 3 (M3)	45	9	6	0	4
4	Menuju SNP 4 (M4)	9	61	69	48	68
5	SNP	0	0	0	12	0
Jumlah Sekolah		73	75	75	61	72

Dari tabel 1.14 dapat diuraikan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 72 sekolah memiliki rapor mutu. Dari 72 sekolah tersebut tidak ada sekolah yang menuju SNP, maksimal menuju SNP 4. Jumlah sekolah yang menuju SNP 4 sebanyak 68 sekolah dan yang menuju SNP 3 sebanyak 4 sekolah. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan. Penyebab yang paling dominan tentunya kondisi pandemi Covid-19 yang memaksa sekolah untuk mengubah cara pengelolaan. Hal ini terutama berdampak

pada berubahnya model pembelajaran guru. Faktor lainnya masih sama dengan tahun sebelumnya, seperti: pemahaman responden terhadap instrumen masih lemah, keterampilan operator dalam melakukan *input* data PMP masih perlu ditingkatkan, serta sistem manajemen yang belum memadai.

Untuk memahami lebih lanjut perkembangan jumlah sekolah pada capaian level mutu SNP jenjang SMP Kabupaten Buleleng dari tahun 2016 sampai dengan 2020 digambarkan pada Gambar 1.11 berikut.

Gambar 2.11 Grafik Capaian Level Mutu SNP Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020



<https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> 22/06/2021 10:45

Untuk mengetahui capaian mutu SNP jenjang SMP masing kecamatan di Kabupaten Buleleng sebagai bahan untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan dan program pemenuhan mutu di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 1.15 berikut.

Tabel 1.15 Perbandingan Capaian Mutu SNP Jenjang SMP Setiap Kecamatan di Kabupaten Buleleng tahun 2016 sampai 2020

No	Wilayah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kec. Banjar	3.99	5.38	5.47	6.51	5.62
2	Kec. Busungbiu	3.87	4.89	5.50	6.55	5.87
3	Kec. Kubutambahan	2.87	5.72	5.75	6.65	5.68
4	Kec. Sawan	3.38	5.27	5.43	6.57	5.55
5	Kec. Sukasada	3.63	4.91	5.51	6.17	5.67
6	Kec. Gerogkak	4.13	4.85	5.23	6.45	5.66
7	Kec. Buleleng	4.22	5.40	5.55	6.53	6.20

8	Kec. Tejakula	4.36	5.26	5.53	6.53	5.57
9	Kec. Seririt	3.60	5.11	5.61	6.63	5.72
Rerata		4.56	5.31	5.52	6.51	5.71

Berdasarkan tabel tersebut dapat diuraikan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng memiliki peningkatan capaian mutu pendidikan dari tahun 2016 sampai tahun 2019, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020. Secara umum rerata capaian SNP pada tahun 2016 mencapai 4.56 dengan kategori menuju SNP 3, menjadi 5.31 dengan kategori menuju SNP 4. Capaian tahun 2018 sebesar 5.52 dengan kategori menuju SNP 4 dan tahun 2019 mencapai 6.51 dengan kategori menuju SNP 4. Tahun 2020 juga sebatas menuju SNP 4. Yang menarik, pada tahun 2020 walaupun capaian data mutunya hampir merata di tiap kecamatan, tetapi jika dilihat yang paling rendah adalah Kecamatan Sawan dan Tejakula dimana keduanya termasuk Buleleng Bagian Timur..

Berdasarkan data pada tabel 1.12 dapat dilihat dengan jelas bahwa semua standar memiliki capaian mutu hampir merata. Walaupun demikian, ada 2 standar yang memiliki capaian mutu terendah, yaitu standar proses dengan capaian 5.52 dan standar sarana dan prasarana dengan capaian 4.91.

Untuk mengetahui indikator dan sub indikator mana yang menjadi penyebab masih rendahnya capaian kedua standar tersebut. Indikator dan sub indikator digunakan untuk mengetahui lebih dalam faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya capaian rapor mutu sekolah. Indikator dan sub indikator tersebut dapat kita lihat pada Tabel 1.16 berikut.

Tabel 1.16 Capaian Mutu Standar dan Indikator Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2020	
Nomor	Standar/Indikator/Sub Indikator	Nilai	Kategori
1	Standar Kompetensi Lulusan	5.90	★★★★★
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.13	★★★★★
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	5.79	★★★★★
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	5.73	★★★★★
2	Standar Isi	5.63	★★★★★

2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5.89	★★★★★
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	6.44	★★★★★
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	4.55	★★★★
3	Standar Proses	5.52	★★★★★
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	4.96	★★★★
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.01	★★★★★
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	5.59	★★★★★
4	Standar Penilaian Pendidikan	5.97	★★★★★
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	5.19	★★★★★
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	6.48	★★★★★
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	5.70	★★★★★
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	6.36	★★★★★
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	6.13	★★★★★
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.22	★★★★★
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	6.61	★★★★★
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	6.25	★★★★★
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	6.64	★★★★★
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	2.00	★★
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	6.22	★★★★★

6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.91	★★★
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4.61	★★★★
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	5.68	★★★★★
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	5.43	★★★★★
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	5.75	★★★★★
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.29	★★★★★
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.24	★★★★★
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	6.08	★★★★★
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	5.61	★★★★★
8	Standar Pembiayaan	5.82	★★★★★
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	7.00	★★★★★★
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.41	★★★★★
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	5.22	★★★★★

Data pada Tabel 1.16 dapat dijelaskan bahwa hampir semua capaian SNP dan indikatornya berada pada bintang 4 atau bintang 5. Sebagian kecil bintang tiga dan hanya 1 indikator yang masih berada pada bintang 2, yaitu indikator 5.4 tentang “Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan”.

Secara umum data capaian SNP jenjang SMP Kabupaten Buleleng tahun 2020 menunjukkan bahwa di antara 8 standar, hanya 2 standar yang nilainya relatif rendah, yaitu **standar sarana dan prasarana** dengan capaian **4.91** dan **standar proses** dengan capaian **5.52**. Jika perhatian ditujukan hanya terbatas pada data capaian standar, maka yang paling urgen harus mendapat perhatian adalah dua standar tersebut. Demikian pula kalau perhatian ditujukan sampai aspek indikator, yang tampak lemah hanya pada indikator 5.4, yaitu tentang “**Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan**”.

Indikator ini memiliki data capaian 2.00 (masuk dalam kategori bintang 2).

Cara menganalisa dalam bentuk global seperti itu tentunya kurang tepat, akan sulit menyusun rekomendasinya. Walaupun dapat disusun rekomendasi, arah tujuannya cenderung tidak jelas atau kurang spesifik dan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, dalam hal ini kajian harus lebih mendalam, yaitu sampai menulik pada data capaian setiap sub indikator pada masing-masing standar. Meskipun nilai standarnya tinggi dan nilai indikatornya juga tidak ada yang mencolok rendah, tidak menutup kemungkinan di dalamnya terdapat sub indikator yang nilainya kurang. Dalam konteks ini, yang dimaksudkan nilai kurang (nilai rapornya merah) adalah bintang 1 dan bintang 2.

Hasil kajian tentang data capaian tiap sub indikator pada rapor mutu jenjang SMP Kabupaten Buleleng tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) sub indikator yang “merah” (berkategori bintang 1 dan bintang 2). Jika dirinci, dapat disebutkan sebarannya sebagai berikut: 1 sub indikator pada Standar Isi, 1 sub indikator pada Standar Proses, 1 sub indikator pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 7 sub indikator pada Standar Sarana dan Prasarana. Beberapa tabel berikut ini menunjukkan daftar sub indikator yang bernilai rendah atau memiliki kategori bintang 1 dan bintang 2.

Tabel 1.17 Daftar Sub Indikator Bernilai Rendah pada Standar Isi Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2020	
Nomor	Standar/Indikator/Sub Indikator	Nilai	Kategori
2	Standar Isi	5.63	★★★★★
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	4.55	★★★★
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	3.54	★★

<https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> diunduh tanggal 26-06-2021 18:45

Tabel 1.18 Daftar Sub Indikator Bernilai Rendah pada Standar Proses Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2020	
Nomor	Standar/Indikator/Sub Indikator	Nilai	Kategori
2	Standar Proses	5.52	★★★★
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	4.96	★★★
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	1.66	★

<https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> diunduh tanggal 26-06-2021 18:45

Tabel 1.19 Daftar Sub Indikator Bernilai Rendah pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2020	
Nomor	Standar/Indikator/Sub Indikator	Nilai	Kategori
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.22	★★★★★
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	2.00	★★
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai	1.39	★

<https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> diunduh tanggal 26-06-2021 18:45

Tabel 1.20 Daftar Sub Indikator Bernilai Rendah pada Standar Sarana dan Prasarana Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2020	
Nomor	Standar/Indikator/Sub Indikator	Nilai	Kategori
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.91	★★★★
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4.61	★★★★
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	2.33	★★
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	1.23	★
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	5.68	★★★★★
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	3.36	★★
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	5.48	★★★★★
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar	1.5	★
6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar	2.25	★★
6.3.10	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar	3.5	★★
6.3.22	Kondisi ruang konseling layak pakai	2.25	★★

<https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> diunduh tanggal 26-06-2021 18:45

D. Akar Masalah dan Rekomendasi

1. Meneropong Akar Masalah

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, ada 10 sub indikator yang tersebar dalam 4 SNP memiliki nilai rendah. Dalam kaitan itu, penyusunan rekomendasi akan difokuskan pada 10 sub indikator tersebut. Oleh karena itu, sebelum menggali akar masalahnya untuk selanjutnya dicarikan solusinya, perlu diuraikan kembali sub indikator terkait. Berikut ini disajikan kembali 10 sub indikator yang nilainya rendah.

Tabel 1.21 Daftar 10 Sub Indikator Bernilai Rendah Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2020	
Nomor	Standar/Indikator/Sub Indikator	Nilai	Kategori
1	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	3.54	★★
2	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	1.66	★
3	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai	1.39	★
4	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	2.33	★★
5	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	1.23	★
6	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	3.36	★★
7	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar	1.5	★
8	Memiliki ruang konseling sesuai standar	2.25	★★
9	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar	3.5	★★
10	Kondisi ruang konseling layak pakai	2.25	★★

<https://rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id/?d=1> diunduh tanggal 26-06-2021 18:45

Berdasarkan tabel 1.21 di atas, dapat dikatakan bahwa sub indikator yang nilainya rendah mayoritas berada pada standar sarana dan prasarana. Pada standar Sarana dan Prasarana Pendidikan terdapat 7 sub indikator yang capaiannya masih bintang 1 dan bintang 2. Ini tersebar pada dua indikator yang capaian masih di bawah bintang 4, yaitu

pada indikator 6.1. Oleh karena itu, kajian akan difokuskan pada indikator tersebut. Indikator 6.1, 6.2, dan 6.3. Indikator 6.1 misalnya memuat tentang “kapasitas daya tampung sekolah” yang nilainya belum optimal, ini menarik untuk dikaji. Pada indikator tersebut memiliki skor capaian 4.61 (bintang tiga). Lemahnya capaian indikator ini disebabkan oleh sub indikator pemilikan ragam prasarana belum sesuai ketentuan, memperoleh 1.23 (bintang 1) dan sub indikator tentang “kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai”, dengan skor 2.33 (bintang 2).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa memang benar apa yang tertera pada rapor mutu sekolah sesuai dengan kondisi sekolah. Hal ini didukung pula oleh hasil penelitian LPMP Bali tentang tingkat akurasi data mutu PMP satuan pendidikan tahun 2019. Sebagai contoh tentang “pemilikan sarana dan prasarana”, rata-rata sekolah masih membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk melengkapinya. Walaupun beberapa sarpras sudah ada di sekolah, namun banyak yang tidak sesuai persyaratan yang ditetapkan. Sebagai contoh, ruang kepala sekolah sudah pasti ada, tetapi ukuran luasnya tidak sesuai (lebih kecil dari ketentuan). Demikian juga ruang UKS, kamar mandi, lapangan, dan sebagainya. Senada dengan itu untuk sub indikator “kapasitas rombongan belajar” pada tahun 2020, sesungguhnya sekolah bermaksud taat aturan tetapi karena jumlah tamatan SD melebihi kapasitas daya tampung SMP, maka beberapa sekolah mengisi kelas melebihi ketentuan.

Jika dikaji lebih detail, misalnya pada indikator 6.3 tentang sarpras pendukung ditemukan skor capaian beberapa sub indikator yang sangat rendah, yaitu sub indikator 6.3.7, 6.3.9, 6.3.10, dan 6.3.22. Untuk memberi gambaran, apa bunyi tiap sub indikator tersebut dan apa akar penyebab rendahnya skor capaiannya, berikut diuraikan satu per satu.

Untuk sub indikator 6.3.7 tentang “pemilikan ruang sirkulasi yang sesuai standar”, memperoleh skor capaian 1.5 (bintang 1). Setelah dilakukan pengamatan langsung ke sekolah, ternyata sebagian besar sekolah sesungguhnya sudah memiliki ruang sirkulasi, tetapi belum sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sub indikator 6.3.9 tentang “ruang konseling sesuai standar” memperoleh skor 2.25 (bintang 2). Berdasarkan pengamatan ke lapangan ditemukan rata-rata ukuran ruang konseling tidak sesuai ketentuan. Banyak sekolah menyediakan ruang konseling apa adanya karena belum ada bantuan khusus untuk pembangunan ruang Bimbingan Konseling (BK).

Sejalan dengan sub indikator 6.3.9, untuk indikator 6.3.10 tentang “kepemilikan ruang OSIS sesuai ketentuan” memiliki capaian skor masih rendah, yaitu 3.5 (bintang 2). Hal ini disebabkan tidak adanya bantuan khusus pembangunan ruang OSIS bagi sekolah baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Jika perhatian difokuskan pada sub indikator 6.3.22 tentang “**Kondisi ruang konseling layak pakai**” dengan skor capaian 2.25 (bintang 2), dapat dikatakan bahwa ini tidak lepas dari kondisi sub indikator 6.3.9 tentang ruang konseling tidak standar. Dari sisi ukuran ruang konseling tidak memenuhi standar ditambah lagi beberapa kelengkapan pendukung yang semestinya ada di ruang konseling tidak layak pakai,

seperti: kamar *one way screen* belum ada, meja yang tidak sesuai ketentuan. Dilihat dari sisi kenyamanan dan kerahasiaan yang semestinya dalam ruang konseling masih jauh dari harapan.

Pada standar lain ada pula sub indikator yang memiliki data capaian relatif rendah, seperti pada Standar Isi, khusus sub indikator 2.3.3 tentang “menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal” memiliki data capaian 3.54 (bintang 2). Demikian pula pada standar proses, sub indikator 3.1.4 tentang “mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah” memiliki data capaian 1.66 (bintang 1). Pada standar tendik khususnya sub indikator 5.4.4 tentang “tersedia kepala tenaga laboratorium berpengalaman yang sesuai ketentuan” memiliki data capaian 1.39 (bintang 1).

Jika dilakukan kajian secara lebih mendalam tentang rendahnya data capaian dari masing-masing sub indikator tersebut, dapat diuraikan satu per satu sebagai berikut:

1. Untuk sub indikator 2.3.3 tentang “menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal” memiliki data capaian rendah disebabkan oleh pertimbangan kepala sekolah dalam menyederhanakan kurikulum masa pandemi adalah memprioritaskan muatan nasional, sedangkan beberapa sekolah tidak mencantumkan muatan lokal secara eksplisit.
2. Untuk sub indikator 3.1.4 tentang “mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah” memiliki data capaian rendah karena proses pembelajaran ketika itu dilakukan secara daring dengan aplikasi terbatas, rata-rata hanya menggunakan WhatsApp (WA) dan belum banyak guru tahu bahwa WA pun bisa digunakan *video conference* dengan peserta lebih dari 2 orang. Dengan keterbatasan itu, baik kepala sekolah maupun pengawas sekolah sulit untuk melakukan pemantauan secara daring yang berdampak sulitnya melakukan evaluasi terhadap aktivitas guru.
3. Untuk sub indikator 5.4.4 tentang “tersedia kepala tenaga laboratorium berpengalaman yang sesuai ketentuan” memiliki data capaian disebabkan oleh rata-rata sekolah tidak memiliki tenaga dimaksud.

5. Rekomendasi dan Sasaran yang Dituju

Setiap persoalan yang muncul tentu dilatarbelakangi atas adanya akar masalah. Pada uraian sebelumnya telah diuraikan akar masalah dari setiap sub indikator yang bernilai rendah tersebut. Langkah berikutnya yang amat strategis adalah menentukan tindakan penyelesaian. Setelah dapat ditentukan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, barulah dirumuskan rekomendasi yang akan diteruskan kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini sangat dibutuhkan ketelitian agar rekomendasi yang dibuat tajam, operasional, dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil kajian mendalam tentang substansi dan akar masalah masing-masing sub indikator yang bernilai kurang tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan beberapa rekomendasi seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 1.22 Rekomendasi Peningkatan Mutu dan Sasaran yang Dituju pada Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

REKOMENDASI		SASARAN	
SUB INDK	Rumusan Rekomendasi	Utama	Pendamping
2.3.3	1. Sekolah wajib mengembangkan kurikulum yang dilengkapi aspek muatan lokal serta diimplementasikan sesuai prosedur dengan pendampingan langsung oleh pengawas manajerial.	Sekolah	Pengawas manajerial
3.1.4	2. Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah wajib melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan membuat laporan pelaksanaannya secara berkala yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Komite Sekolah.	Kepala sekolah dan pengawas manajerial	Dinas Pendidikan, Komite sekolah
5.4.4	3. Sekolah wajib mengadakan Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman/ sesuai ketentuan dengan cara mengusulkan ke pemerintah daerah dan meningkatkan kompetensinya dengan memberi pelatihan yang sesuai.	Kepala Sekolah	Pemerintah Daerah
6.1.1	4. Pemerintah Daerah wajib memindahkan kelebihan siswa di sekolah negeri ke sekolah swasta yang masih memiliki formasi dan/atau menambah kapasitas rombongan belajar pada wilayah-wilayah over kapasitas siswa baru dengan cara menambah RKB atau membuat sekolah baru.	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat
6.1.6	5. Kepala Sekolah wajib menambah kelengkapan sarana dan prasarana sekolah baik jumlah maupun ragamnya dengan cara mengefektifkan penggunaan dana BOS serta sumber dana lainnya yang relevan melalui koordinasi dengan pengawas manajerial, Komite Sekolah, dan Pemerintah Daerah.	Kepala Sekolah	Pengawas Manajerial, Komite Sekolah, Pemerintah Daerah

6.2.2	6. Sekolah agar menyiapkan laboratorium IPA sesuai standar dengan mengusahakan dari sumber anggaran yang relevan dan/atau menyampaikan usulan kebutuhan lab. IPA kepada Pemerintah Daerah.	Kepala Sekolah	Komite Sekolah, Pemerintah Daerah
6.3.7	7. Sekolah agar mengusahakan ruang sirkulasi sesuai standar dengan cara memprogramkan secara bertahap untuk penggunaan dana BOS, meminta bantuan komite, dan/atau menyampaikan usulan kebutuhan lab. IPA kepada Pemerintah Daerah.	Kepala Sekolah, Komite sekolah	Pemerintah Daerah
6.3.9	8. Sekolah wajib mengusahakan ruang konseling sesuai standar dengan cara memprogramkan secara bertahap untuk penggunaan dana BOS, meminta bantuan komite, dan/atau menyampaikan usulan kebutuhan lab. IPA kepada Pemerintah Daerah.	Kepala Sekolah, komite sekolah	Pemerintah Daerah
6.3.10	9. Sekolah wajib mengusahakan ruang organisasi kesiswaan sesuai standar dengan cara memprogramkan secara bertahap untuk penggunaan dana BOS, meminta bantuan komite, dan/atau menyampaikan usulan kebutuhan lab. IPA kepada Pemerintah Daerah.	Kepala Sekolah, komite sekolah	Pemerintah Daerah
6.3.22	10. Sekolah wajib menyiapkan ruang konseling layak pakai cara melakukan pembenahan dalam penataan, memprogramkan secara bertahap untuk penggunaan dana BOS, meminta bantuan komite, dan/atau menyampaikan usulan kebutuhan lab. IPA kepada Pemerintah Daerah.	Kepala Sekolah, komite sekolah	Pemerintah Daerah

6. Satuan Pendidikan yang Wajib Melaksanakan Rekomendasi

Seperti diketahui, rapor mutu satuan pendidikan tidaklah seragam. Ada satuan pendidikan yang memiliki rapor mutu bagus dan ada pula satuan pendidikan yang rapor mutunya kurang bagus dilihat dari data capaian standar, indikator, dan sub indikatornya. Pada sisi lain, rekomendasi yang dirumuskan secara rasional ditujukan kepada satuan pendidikan yang memiliki nilai rapor “merah” pada indikator atau sub

indikator terkait. Oleh karena itu agar rekomendasi yang dirumuskan ini tepat sasaran, perlu diidentifikasi satuan-satuan pendidikan yang memiliki nilai rendah pada masing-masing sub indikator penyumbang rendahnya data PMP di tingkat kabupaten.

Bertolak dari pemahaman tersebut, dalam konteks ini dilakukan identifikasi terhadap satuan-satuan pendidikan yang memiliki nilai rendah pada masing-masing sub indikator penyumbang rendahnya data PMP kabupaten. Sekolah-sekolah yang memiliki data capaian rendah (bintang 1 dan bintang 2) pada masing-masing sub indikator (pada 10 sub indikator bernilai rendah) wajib menindaklanjuti rekomendasi terkait. Untuk memudahkan pengamatan, perlu disajikan dalam bentuk tabel. Pada tabel dapat dilihat kategori sekolah pada masing-masing sub indikator. Perhatikan tabel 1.23 sampai dengan tabel 1.26 berikut.

Tabel 1.23 Sekolah dan Kategorinya Pada 10 Sub Indikator di Kecamatan Buleleng

SEKOLAH	KATEGORI PADA 10 SUB INDIKATOR BERNILAI RENDAH									
	2.3.3	3.1.4	5.4.4	6.1.1	6.1.6	6.2.2	6.3.7	6.3.9	6.3.10	6.3.22
SMP Negeri 1 Singaraja	5	3	5	2	1	2	1	5	5	5
SMP Negeri 7 Singaraja	2	1	1	2	1	2	5	5	5	1
SMP Tri Amerta Singaraja	2	1	1	2	1	2	1	5	5	5
SMP Negeri 2 Singaraja	5	1	1	2	1	2	1	1	5	1
SMP Negeri 6 Singaraja	2	1	1	2	1	2	1	1	5	1
SMP Dwi Jendra Singaraja	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Negeri 8 Singaraja	2	1	-	2	1	2	1	1	1	1
SMP Negeri 3 Singaraja	1	1	0	2	1	2	1	1	1	1
SMP Negeri 4 Singaraja	2	2	1	3	1	2	2	1	3	4
SMP Paulus Singaraja	2	1	0	2	1	2	1	5	5	5
SMP Lab Undiksha	2	1	0	2	1	2	1	5	5	5
SMP Negeri 5 Singaraja	2	1	1	2	1	2	1	1	5	1
SMP Mutiara Singaraja	2	1	1	2	1	2	1	2	2	1
SMP Muhammadiyah 2 Singaraja	5	4	1	2	1	2	1	5	5	5
NOMOR REKOMENDASI TERKAIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan: Diolah menggunakan Program Excel

Pada tabel tersebut di atas dapat dilihat daftar sekolah serta kategori yang diperolehnya pada masing-masing sub indikator bernilai rendah pada skala kabupaten. Dalam hal ini tidak semua sekolah memperoleh data capaian rendah pada setiap sub

indikator dimaksud. Bahkan ada sekolah yang mencapai bintang 5 pada sub indikator yang secara level kabupaten tergolong bernilai rendah.

Sebagai contoh, SMP Negeri 1 Singaraja memiliki bintang 1 hanya pada sub indikator 6.1.6 dan 6.3.7, sementara sub indikator lainnya memiliki kategori bintang 3 ke atas. Perhatikan cuplikan tabel berikut ini!

SEKOLAH	KATEGORI PADA 10 SUB INDIKATOR BERNILAI RENDAH									
	2.3.3	3.1.4	5.4.4	6.1.1	6.1.6	6.2.2	6.3.7	6.3.9	6.3.10	6.3.22
SMP Negeri 1 Singaraja	5	3	5	2	1	2	1	5	5	5
					○ ↓		○ ↓			
REKOMENDASI WAJIB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Dalam konteks ini SMP Negeri 1 Singaraja wajib menindaklanjuti rekomendasi nomor 5 (berkaitan dengan solusi atas lemahnya pada sub indikator 6.1.6) dan rekomendasi 7 (berkaitan dengan solusi atas lemahnya pada sub indikator 6.3.7). Untuk rekomendasi lainnya, perlu juga ditindaklanjuti tetapi urgensinya tidak sebesar rekomendasi 5 dan 7. Artinya, prioritas pertama yang harus ditindaklanjuti adalah rekomendasi 5 dan 7.

Tabel 1.24 Sekolah dan Kategorinya Pada 10 Sub Indikator untuk Buleleng Bagian Timur

SEKOLAH	KATEGORI PADA 10 SUB INDIKATOR BERNILAI RENDAH									
	2.3.3	3.1.4	5.4.4	6.1.1	6.1.6	6.2.2	6.3.7	6.3.9	6.3.10	6.3.22
SMP Negeri 3 Kubutambahan	1	1	1	2	1	2	1	5	5	5
SMP Negeri 4 Kubutambahan	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Negeri 5 Kubutambahan	5	4	1	2	1	2	1	1	5	1
SMP Satap 1 Kubutambahan	4	1	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Negeri 1 Kubutambahan	2	1	1	2	1	2	1	1	5	1
SMP Satap 2 Kubutambahan	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Satap 3 Kubutambahan	3	1	1	2	1	2	1	1	5	1

SMP Negeri 1 Sawan	3	1	2	2	1	2	1	1	4	1
SMP Satap 1 Sawan	2	1	1	2	1	2	1	5	5	5
SMP Negeri 2 Sawan	2	1	2	1	1	2	1	4	5	4
SMP Budi Luhur Sudaji	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Negeri 4 Tejakula	2	1	0	2	1	2	1	5	5	5
SMP Negeri 2 Tejakula	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Negeri 1 Tejakula	3	1	0	2	1	2	1	1	1	1
SMP Negeri 3 Sawan	3	1	2	1	1	2	1	3	4	3
SMP Negeri 4 Sawan	3	1	3	1	1	2	1	2	4	4
SMP Negeri 3 Tejakula	2	1	1	1	1	2	1	1	5	1
SMP Negeri 5 Tejakula	2	3	1	2	1	2	1	5	1	5
SMP Negeri 6 Tejakula	2	1		2	1	2	1	1	5	1
NOMOR REKOMENDASI TERKAIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan: Diolah menggunakan Program Excel

Tabel 1.25 Sekolah dan Kategorinya Pada 10 Sub Indikator Buleleng Bagian Tengah

SEKOLAH	KATEGORI PADA 10 SUB INDIKATOR BERNILAI RENDAH									
	2.3.3	3.1.4	5.4.4	6.1.1	6.1.6	6.2.2	6.3.7	6.3.9	6.3.10	6.3.22
SMP Negeri 2 Sukasada	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Negeri 3 Sukasada	3	2	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Negeri 4 Sukasada	5	4	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Satap 2 Sukasada	4	1	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Satap 3 Sukasada	3	1	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP TP 45 Wanagiri	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Maulana Pegayaman	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Satap 1 Sukasada	2	1		2	1	2	1	1	1	1
SMP Ayodya Pura Selat	4	2	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Satap 1 Banjar	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Negeri 3 Banjar	1	1	5	2	1	2	5	1	1	4
SMP Negeri 2 Banjar	2	1	1	2	1	2	5	1	1	1
SMP Satap 3 Banjar	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Negeri 1 Banjar	2	2	1	2	1	2	1	5	5	5

SMP Satap 2 Banjar	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Negeri 4 Banjar	2	1	0	2	1	2	1	1	1	1
NOMOR REKOMENDASI TERKAIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan: Diolah menggunakan Program Excel

Tabel 1.26 Sekolah dan Kategorinya Pada 10 Sub Indikator Buleleng Bagian Barat

SEKOLAH	KATEGORI PADA 10 SUB INDIKATOR BERNILAI RENDAH									
	2.3.3	3.1.4	5.4.4	6.1.1	6.1.6	6.2.2	6.3.7	6.3.9	6.3.10	6.3.22
SMP PGRI 2 Buleleng	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Dharma Kerti	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Saraswati Seririt	2	1	1	2	1	2	1	5	5	5
SMP Maya Seririt	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Negeri 3 Seririt	2	1	1	2	1	2	1	5	5	5
SMP Negeri 1 Seririt	3	1	1	2	1	2	1	1	5	1
SMP Negeri 2 Seririt	3	2	1	2	1	2	2	1	1	2
SMP PGRI Seririt	5	3	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Mihtajul Ulum	2	1	0	2	1	2	5	5	5	5
SMP Negeri 3 Busungbiu	2	1	1	2	1	2	1	5	1	5
SMP Negeri 2 Busungbiu	1	1	1	2	1	2	1	1	5	1
SMP Negeri 5 Busungbiu	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Negeri 4 Busungbiu	2	1	0	2	1	2	1	5	5	5
SMP Negeri 1 Busungbiu	3	1	0	2	1	2	1	1	5	1
SMP Negeri 2 Gerokgak	4	1	5	2	1	2	1	1	1	1
SMP Negeri 1 Gerokgak	4	1	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Negeri 4 Gerokgak	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Negeri 3 Gerokgak	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2
SMP Negeri 5 Gerokgak	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1
SMP Nusa Dua Gerokgak	3	3	0	2	1	2	1	1	1	1
NOMOR REKOMENDASI TERKAIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan: Diolah menggunakan Program Excel

BAB
III

**EVALUASI PERMASALAHAN
PENGUMPULAN DATA
PMP TAHUN 2020**

A. Progres Sekolah Belum Kirim Data PMP

Pada laman manajemen PMP, selain dapat diketahui progres pengiriman data PMP dapat juga diunduh sekolah yang belum mengirim data PMP, sekolah yang belum hitung rapor mutu dan sekolah yang belum olah rapor mutu atau yang belum memiliki rapor mutu. Berdasarkan data pada laman tersebut terdapat 1 SMP di Kabupaten Buleleng yang belum mengirim data PMP.

Tabel 2.1 Data SMP di Kabupaten Buleleng yang Belum Kirim PMP

No	Nama sekolah	Alamat Sekolah	Proses Pengerjaan	Status Pengerjaan
1	SMP Saraswati Singaraja	Jalan Bisma No.4 Singaraja	50%	2

<http://manajemen.pmp.kemdikbud.go.id/progres-pengiriman/1/220000> 29/08/2021; 1:59

Keterangan:

Ditulis 1 jika pengerjaan selesai di bawah 25%

2 jika pengerjaan selesai 26 – 50%

3 jika pengerjaan selesai 51 – 75%

4 jika pengerjaan selesai 76 – 100%

Berdasarkan data pada tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa terdapat 1 sekolah SMP di Kabupaten Buleleng yang proses pengerjaannya baru berada pada level 3 (51 – 75%), sehingga sekolah tersebut sampai saat ini belum memiliki rapor mutu.

Mengapa bisa demikian, setelah ditelusuri ternyata penyebabnya adalah sempat terjadi hubungan kurang harmonis antara kepala sekolah dan operator sekolah, yang

berujung pada mogoknya operator sekolah dan tidak melanjutkan pekerjaannya. Dalam hal ini operator sekolah adalah pegawai honorer yang sewaktu-waktu dapat berhenti atau dihentikan dalam bekerja.

B. Progres Sekolah Belum Hitung Rapor Mutu

Seperti halnya pada pengiriman data PMP progres hitung rapor dan sekolah yang belum hitung rapor juga dapat diunduh dari laman manajemen PMP. Sekolah yang belum hitung rapor di Kabupaten Buleleng sebanyak 2 sekolah dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Data SMP Kabupaten Buleleng yang Belum Hitung Rapor

No	Nama sekolah	Alamat Sekolah	Proses Pengerjaan	Status Pengerjaan
1	SMP Saraswati Singaraja	Jalan Bisma No.4 Singaraja	50%	2
2	SMPN Satap 1 Gerokgak	Gerokgak	75%	3

<http://manajemen.pmp.kemdikbud.go.id/progres-pengiriman/1/220000> 29/08/2020; 1:59

Keterangan:

- Ditulis : 1, jika pengerjaannya telah selesai di bawah 25%
- 2, jika pengerjaannya telah selesai 26 – 50%
- 3, jika pengerjaannya selesai 51 – 75%
- 4, jika pengerjaannya selesai 76 – 100%

Berdasarkan tabel data 2.2 dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 sekolah jenjang SMP di Kabupaten Buleleng yang belum melakukan penghitungan rapor mutunya. Dari 2 sekolah tersebut, 1 sekolah memang berstatus belum kirim dan 1 lagi sudah kirim tetapi belum hitung, yaitu SMPN Satap 1 Gerokgak.

Setelah dicari fakta di lapangan, ditemukan bahwa faktor penyebab belum hitungnya data mutu di SMPN Satap 1 Gerokgak adalah unsur keteledoran operator. Sekolah ini mengalami pergantian pengawas manajerial bertepatan dengan masa pengisian data PMP. Pada awalnya, sekolah ini intensif mengisi data mutunya seperti tahun sebelumnya dengan pendampingan pengawas sekolah, tetapi ketika ada pergantian pengawas sekolah terjadi kevakuman pendampingan. Pengawas sekolah baru menganggap data PMP telah tuntas, sementara pengawas lama tidak lagi melakukan pendampingan di sekolah tersebut karena tugasnya sudah berpindah ke sekolah lain. Kevakuman dalam pendampingan inilah menyebabkan operator abai/teledor sehingga sampai cut-off pada sistem PMP, sekolah belum melakukan proses hitung pada data mutu PMP-nya. Hal ini dapat menjadi pelajaran berharga agar ke depan setiap dilakukan pergantian

pengawas sekolah dilakukan acara serah terima resmi yang disaksikan pejabat dari Dinas Pendidikan. Pada saat serah terima itu sekaligus dilakukan penyampaian progres pelaksanaan tugas pengawas lama dan menegaskan hal-hal yang perlu dilanjutkan oleh pengawas baru.

C. Capaian SNP Tertinggi dan Terendah Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2020

Terlepas dari berbagai hambatan dalam pengiriman dan pemrosesan data PMP, pada bagian ini akan ditampilkan 10 SMP yang memiliki capaian SNP tertinggi dan 10 SMP yang memiliki capaian SNP terendah dari seluruh SMP yang ada di Kabupaten Buleleng. Ditampilkannya data ini dengan tujuan agar pemerintah daerah (Cq Disdikpora) melalui TPMD melakukan verifikasi dan validasi data tentang kebenaran data ini. Munculnya nama-nama sekolah berikut sama sekali bukan untuk dipuji ataupun diintimidasi melainkan untuk melakukan uji validasi terhadap instrumen dan cara pengisiannya. Adapun datanya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Peringkat 10 SMP dengan Capaian SNP Tertinggi

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Capaian SNP	Jumlah Siswa
1	SMP NEGERI 1 SINGARAJA	Kec. Buleleng	6.52	1081
2	SMP NEGERI 4 SUKASADA	Kec. Sukasada	6.45	499
3	SMP LABORATORIUM UNDIKSHA SINGARAJA	Kec. Buleleng	6.34	200
4	SMP MUHAMMADIYAH 2 SINGARAJA	Kec. Buleleng	6.3	123
5	SMP NEGERI 4 SINGARAJA	Kec. Buleleng	6.3	1099
6	SMP NEGERI 2 SINGARAJA	Kec. Buleleng	6.22	1018
7	SMP NEGERI 4 BUSUNGBIU	Kec. Busungbiu	6.19	470
8	SMP NEGERI SATU ATAP 1 KUBUTAMBAHAN	Kec. Kubutambahan	6.09	54
9	SMP NEGERI 1 BANJAR	Kec. Banjar	6.09	1187
10	SMP NEGERI 1 SERIRIT	Kec. Seririt	6.08	979

Sumber: hasil penggabungan data PMP dan Dapodik

Berdasarkan data pada Tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa rentang capaian SNP antara 6,69 yang dimiliki oleh SMP N 6 Singaraja sampai 6,81 yang dimiliki SMP Laboratorium Singaraja Kabupaten Buleleng. Dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Buleleng ada 5 (lima) Kecamatan yang memiliki capaian SNP pada 10 (sepuluh) besar antara lain : Kecamatan Buleleng (4 sekolah), Kecamatan Tejakula (2 sekolah), Kecamatan Kubutambahan 2 sekolah), Kecamatan Busungbiu (1 sekolah) dan Kecamatan Gerokgak (1 sekolah). Kecamatan yang belum ada sekolah yang masuk di 10 (sepuluh) besar adalah Kecamatan Sukasada, Kecamatan Seririt, Kecamatan Banjar dan Kecamatan Sawan.

Selain 10 (sepuluh) sekolah yang memiliki capaian SNP tertinggi di Kabupaten Buleleng pada buku ini juga ditampilkan 10 (sepuluh) sekolah yang memiliki capaian terendah seperti pada tabel 2.5 berikut. Menampilkan sekolah dengan capaian terendah dimaksudkan untuk bahan refleksi bagi pemangku kepentingan untuk melakukan peningkatan capaian mutu pendidikan, pembinaan oleh pengawas sekolah serta sasaran program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten

Tabel 2.5 Peringkat 10 SMP dengan Capaian SNP Terendah

NO	NAMA SEKOLAH	Kecamatan	Capaian SNP	Jumlah Siswa
1	SMP NEGERI 8 SINGARAJA	Kec. Buleleng	4.59	792
2	SMP DWIJENDRA SINGARAJA	Kec. Buleleng	4.66	15
3	SMP SARASWATI SERIRIT	Kec. Seririt	4.91	117
4	SMP NEGERI SATU ATAP 1 SAWAN	Kec. Sawan	4.95	142
5	SMP BUDHI LUHUR SUDAJI	Kec. Sawan	5.1	129
6	SMP NEGERI 3 KUBUTAMBAHAN	Kec. Kubutambahan	5.16	440
7	SMP NEGERI 2 KUBUTAMBAHAN	Kec. Kubutambahan	5.18	813
8	SMP TP 45 SUKASADA	Kec. Sukasada	5.19	37
9	SMP NEGERI SATU ATAP 3 BANJAR	Kec. Banjar	5.23	121
10	SMP NEGERI SATU ATAP 2 BANJAR	Kec. Banjar	5.24	99

Sumber: Hasil penggabungan data PMP dan Dapodik

Berdasarkan data pada Tabel 2.5 dapat dijelaskan bahwa seluruh sekolah jenjang SMP di Kabupaten Buleleng yang masuk dalam kategori 10 (sepuluh) sekolah dengan capaian SNP terendah adalah sekolah yang tidak mengirimkan rapor mutu, sekolah yang tidak menghitung dan tidak terolah rapor mutunya. Dengan data yang ada pemerintah daerah (Cq) Disdikpora Kabupaten Buleleng dapat merancang program pembinaan dan peningkatan capaian mutu pendidikan pada tahun-tahun berikutnya.

D. Sekolah yang Minimal Telah Menuju SNP 4 Tahun 2020

Berdasarkan rapor mutu tahun 2020 tidak ada sekolah yang mencapai SNP, tetapi sekolah yang menuju SNP 4 jumlahnya cukup banyak, yaitu: 68. Adapun sekolah-sekolah yang berkategori menuju SNP 4 adalah seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Data Sekolah yang Minimal Telah Menuju SNP Tahun 2020

No	Nama Sekolah	Data Capaian
1	SMP NEGERI 1 SINGARAJA	6.52
2	SMP NEGERI 4 SUKASADA	6.45
3	SMP LABORATORIUM UNDIKSHA SINGARAJA	6.34
4	SMP MUHAMMADIYAH 2 SINGARAJA	6.3
5	SMP NEGERI 4 SINGARAJA	6.3
6	SMP NEGERI 2 SINGARAJA	6.22
7	SMP NEGERI 4 BUSUNGBIU	6.19
8	SMP NEGERI SATU ATAP 1 KUBUTAMBAHAN	6.09
9	SMP NEGERI 1 BANJAR	6.09
10	SMP NEGERI 1 SERIRIT	6.08
11	SMP NEGERI SATU ATAP 3 KUBUTAMBAHAN	6.08
12	SMP NEGERI 7 SINGARAJA	6.07
13	SMP NEGERI 6 SINGARAJA	6.07
14	SMP NEGERI 2 SERIRIT	6.07

15	SMP TRIAMERTA SINGARAJA	6.05
16	SMP MAULANA PEGAYAMAN	6.05
17	SMP NUSA DUA GEROKGAK	6.04
18	SMP PGRI SERIRIT	6.03
19	SMP NEGERI 4 SAWAN	6.03
20	SMP NEGERI 4 TEJAKULA	6.02
21	SMP NEGERI 5 SINGARAJA	5.99
22	SMP MUTIARA SINGARAJA	5.98
23	SMP NEGERI 5 KUBUTAMBAHAN	5.96
24	SMP NEGERI 1 SUKASADA	5.95
25	SMP NEGERI 3 SINGARAJA	5.93
26	SMP NEGERI 5 BUSUNGBIU	5.92
27	SMP NEGERI 3 SAWAN	5.91
28	SMP NEGERI 3 SERIRIT	5.88
29	SMP NEGERI 2 BANJAR	5.87
30	SMP NEGERI 1 GEROKGAK	5.82
31	SMP NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN	5.81
32	SMP NEGERI SATU ATAP 2 KUBUTAMBAHAN	5.81
33	SMP NEGERI 3 BUSUNGBIU	5.8
34	SMP NEGERI 4 KUBUTAMBAHAN	5.79
35	SMP NEGERI 4 SERIRIT	5.79
36	SMP NEGERI 3 SUKASADA	5.78
37	SMP NEGERI 5 GEROKGAK	5.75
38	SMP NEGERI 1 TEJAKULA	5.75
39	SMP DHARMAKERTI TUKADMUNGGGA	5.74

40	SMP NEGERI 2 BUSUNGBIU	5.74
41	SMP NEGERI SATU ATAP 2 SUKASADA	5.72
42	SMP NEGERI 3 BANJAR	5.7
43	SMP NEGERI 2 TEJAKULA	5.69
44	SMP NEGERI 1 BUSUNGBIU	5.68
45	SMP NEGERI 1 SAWAN	5.67
46	SMP MIHTAJUL ULUM	5.66
47	SMP NEGERI 2 SAWAN	5.66
48	SMP PGRI 2 BULELENG	5.64
49	SMP NEGERI 3 GEROKGAK	5.62
50	SMP NEGERI SATU ATAP 1 BANJAR	5.62
51	SMP NEGERI 4 BANJAR	5.60
52	SMP NEGERI SATU ATAP 3 SUKASADA	5.56
53	SMP NEGERI 2 GEROKGAK	5.43
54	SMP NEGERI SATU ATAP 1 SUKASADA	5.40
55	SMP AYODHYA PURA SELAT	5.39
56	SMP NEGERI 3 TEJAKULA	5.38
57	SMP NEGERI 6 TEJAKULA	5.32
58	SMP NEGERI 4 GEROKGAK	5.30
59	SMP KATOLIK SANTO PAULUS	5.30
60	SMP NEGERI 5 TEJAKULA	5.28
61	SMP MAYA SERIRIT	5.27
62	SMP NEGERI 2 SUKASADA	5.25
63	SMP NEGERI SATU ATAP 2 BANJAR	5.24
64	SMP NEGERI SATU ATAP 3 BANJAR	5.23
65	SMP TP 45 SUKASADA	5.19

66	SMP NEGERI 2 KUBUTAMBAHAN	5.18
67	SMP NEGERI 3 KUBUTAMBAHAN	5.16
68	SMP BUDHI LUHUR SUDAJI	5.10

Berdasarkan data di atas, ada 4 sekolah yang belum menuju SNP 4 dan 2 sekolah tidak terbit rapor mutunya. Posisi 6 sekolah (4 sekolah belum menuju SNP 4 dan 2 sekolah tidak muncul rapor mutunya) dapat dirinci sebagai berikut.

1. Kecamatan Buleleng dengan 3 sekolah (2 belum menuju SNP 4 dan 1 tidak terbit rapor mutu),
2. Kecamatan Sawan dengan 1 sekolah,
3. Kecamatan Seririt dengan 1 sekolah,
4. Kecamatan Gerokgak dengan 1 sekolah (tidak terbit rapor mutunya).

Adapun tingkat kebenaran data serta bukti-bukti yang menyebabkan 4 sekolah belum mencapai SNP 4 dan 2 sekolah tidak terbit rapor mutunya perlu diverifikasi dan divalidasi kembali.

Jika dilihat secara lebih cermat tentang data capaiannya dan dibandingkan dengan data provinsi Bali (yaitu sebesar 5,74), maka 38 sekolah memiliki data capaian di atas capaian provinsi, 2 sekolah memiliki data capaian persis sama dengan provinsi, 32 sekolah memiliki data capaian di bawah provinsi, dan 2 sekolah tidak dapat ditentukan karena rapor mutunya tidak terbit.

E. Permasalahan Pengumpulan Data

Sampai saat ini masih banyak terdapat permasalahan terkait dengan validitas data PMP. Permasalahan yang muncul dapat berasal dari sistem yang ada pada manajemen PMP itu sendiri, ketelitian pengisian instrumen oleh responden, proses *input* data oleh operator serta *verval* yang dilakukan oleh pengawas manajerial sekolah. Berikut ini beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terkait dengan pemetaan mutu PMP tahun 2020 antara lain:

1. Belum semua sekolah mengirimkan data PMP dan progres pengiriman tidak bisa mencapai 100% karena berbagai kendala.
2. Sekolah mengalami kendala dalam pengisian data PMP pada aplikasi karena belum sempurnanya aplikasi.
3. Sekolah yang telah mengirim data PMP dan gagal melakukan sinkronisasi sehingga data gagal terkirim ke server dan terjadi data yang hilang.
4. Karena perubahan sistem terjadi keterlambatan pengumpulan data mutu Tahun 2019 hingga sampai Tahun 2020
5. Inkonsistensi/ketidakajegan penjadwalan pelaksanaan pengumpulan data mutu.
6. Pemahaman responden yang beragam terhadap instrumen pengumpulan

data disebabkan tidak dilengkapi dengan panduan pengisian instrumen dan deskriptor/rubrik dalam menentukan pilihan jawaban.

7. Infrastruktur sekolah belum memadai
8. Sekolah mengalami kesulitan mendapatkan informasi tentang bagaimana mengatasi kendala dalam menggunakan aplikasi PMP
9. Aplikasi supervisi mutu belum stabil sehingga pengawas tidak optimal dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data mutu sekolah binaannya.
10. Terlambatnya rapor mutu menyebabkan terlambatnya sekolah/LPMP/TPMPD dalam melaksanakan analisis data mutu sebagai acuan untuk penyusunan perencanaan pemenuhan/peningkatan mutu pendidikan.
11. Sinkronisasi data PMP dengan Data Dapodik belum optimal sehingga terjadi beberapa indikator mutu yang tiap tahun sulit ditingkatkan mutunya yaitu pada standar PTK dan Sarpras oleh sekolah.
12. Peta mutu pendidikan belum dijadikan acuan oleh Pemerintah daerah untuk menentukan program peningkatan mutu pendidikan.
13. Instrumen PMP setiap jenjang masih sama, sehingga tidak sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang berbeda pada setiap jenjang.

BAB IV

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Jumlah sekolah jenjang SMP di Kabupaten Buleleng tahun 2020 sebanyak 74 (tujuh puluh empat) dengan rincian SMP Negeri sebanyak 56 (lima puluh enam) dan SMP swasta sebanyak 18 (delapan belas). Progres pengiriman data dapodik tahun 2020 sebanyak 73 sekolah dari 74 sekolah yang ada atau mencapai 98,65%.
2. Dari 73 sekolah yang sudah melakukan proses kirim, sebanyak 72 sekolah yang telah melakukan proses hitung atau sebesar 98,63%.
3. Dari 72 sekolah yang sudah melakukan proses hitung semuanya terbit rapor mutunya, dengan data capaian tertinggi 6,52 (bintang 4) dan terendah 4,59 (bintang 3).
4. Berdasarkan analisis data rapor mutu jenjang SMP Kabupaten Buleleng tahun 2020 dapat dikatakan bahwa data capaian mutu SNP-nya merata pada semua standar, yaitu menuju SNP 4.
5. Dilihat berdasarkan sub indikator terdapat 10 bagian yang data capaiannya sangat rendah (bintang 1 dan bintang 2), sub-sub indikator dimaksud sebagai berikut:
 1. 2.3.3 tentang “menyelenggarakan kurikulum muatan lokal”.
 2. 3.1.4 tentang “mendapatkan evaluasi dari pengawas sekolah dan pengawas sekolah”.
 3. 5.4.4 tentang “tersedia kepala laboratorium yang berpengalaman sesuai ketentuan”.
 4. 6.1.1 tentang “memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai”.
 5. 6.1.6 tentang “memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan”.

6. 6.2.2 tentang “memiliki laboratorium IPA sesuai standar”.
7. 6.3.7 tentang “memiliki ruang sirkulasi sesuai standar”.
8. 6.3.9 tentang “memiliki ruang konseling sesuai standar”.
9. 6.3.10 tentang “memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar”.
10. 6.3.22 tentang “kondisi ruang konseling layak pakai”.

B. Rekomendasi

Setelah dilakukan analisis secara mendalam terhadap substansi permasalahan, menelusuri akar penyebabnya, serta mempertimbangkan studi kelayakannya, dapat dirumuskan 10 rekomendasi sebagai berikut.

- 1 Sekolah wajib mengembangkan kurikulum yang dilengkapi aspek muatan lokal serta diimplementasikan sesuai prosedur dengan pendampingan langsung oleh pengawas manajerial.
- 2 Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah wajib melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan membuat laporan pelaksanaannya secara berkala yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Komite Sekolah.
- 3 Sekolah wajib mengadakan Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman/ sesuai ketentuan dengan cara mengusulkan ke pemerintah daerah dan meningkatkan kompetensinya dengan memberi pelatihan yang sesuai.
- 4 Pemerintah Daerah wajib memindahkan kelebihan siswa di sekolah negeri ke sekolah-sekolah swasta yang masih memiliki formasi dan/atau menambah kapasitas rombongan belajar pada wilayah-wilayah over kapasitas siswa baru dengan cara menambah RKB atau membuat sekolah baru.
- 5 Kepala Sekolah wajib menambah kelengkapan sarana dan prasarana sekolah baik jumlah maupun ragamnya dengan cara mengefektifkan penggunaan dana BOS serta sumber dana lainnya yang relevan melalui koordinasi dengan pengawas manajerial, Komite Sekolah, dan Pemerintah Daerah.
- 6 Sekolah agar menyiapkan laboratorium IPA sesuai standar dengan mengusahakan dari sumber anggaran yang relevan dan/atau menyampaikan usulan kebutuhan lab. IPA kepada Pemerintah Daerah.
- 7 Sekolah agar mengusahakan ruang sirkulasi sesuai standar dengan cara memprogramkan secara bertahap untuk penggunaan dana BOS, meminta bantuan komite, dan/atau menyampaikan usulan kebutuhan lab. IPA kepada Pemerintah Daerah.
- 8 Sekolah wajib mengusahakan ruang konseling sesuai standar dengan cara memprogramkan secara bertahap untuk penggunaan dana BOS, meminta bantuan komite, dan/atau menyampaikan usulan kebutuhan lab. IPA kepada Pemerintah Daerah.

- 9 Sekolah wajib mengusahakan ruang organisasi kesiswaan sesuai standar dengan cara memprogramkan secara bertahap untuk penggunaan dana BOS, meminta bantuan komite, dan/atau menyampaikan usulan kebutuhan lab. IPA kepada Pemerintah Daerah.
- 10 Sekolah wajib menyiapkan ruang konseling layak pakai cara melakukan pembenahan dalam penataan, memprogramkan secara bertahap untuk penggunaan dana BOS, meminta bantuan komite, dan/atau menyampaikan usulan kebutuhan lab. IPA kepada Pemerintah Daerah.

BIOGRAFI PENULIS



I Gusti Agung Oka Yadnya, lahir di Desa Bongkasa, Badung, 31 Desember 1963. Anak bungsu dari pasangan I Gusti Agung Made Regog, I Gusti Agung Ayu Rai. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan berturut-turut di SD No. 1 Bongkasa tahun 1976, SMP Pandawa Cabang Taman dengan ujian negeri di SMP Negeri Blahkiuh tahun 1980. Setamat SMP, penulis melanjutkan studi di SMA Negeri Mengwi jurusan IPA tahun 1983. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di tingkat perguruan tinggi: Diploma 1 Pendidikan Matematika FKIP Universitas Udayana tahun 1984, S1 Pendidikan Matematika FKIP Universitas Udayana tahun 1989. Penulis juga sempat menjadi karyawan Koran (Harian) *Nusa Tenggara* dan menjadi responden *Tabloid Wiyata Mandala*. Tahun 1985 penulis diangkat menjadi guru (PNS) bidang matematika di SMP Negeri 1 Singaraja, selanjutnya tahun 2013 diberi tugas sebagai Kepala SMP Negeri 6 Singaraja dan alih tugas lagi menjadi pengawas sekolah tahun 2018.

Pengalamannya dalam aktivitas menulis dimulai sejak menjadi karyawan Harian *Nusa Tenggara*, berlanjut setelah menjadi guru sering mengikuti lomba karya tulis. Pernah dinobatkan sebagai penulis terbaik oleh *Tabloid Wiyata Mandala* dan selama menjadi guru sering memenangkan lomba menulis, baik di tingkat daerah maupun nasional. Khusus prestasi nasional meliputi: 6 kali menjuarai Lomba Kreativitas Guru Tingkat (tahun: 1992, 1993, 1994, 1996, 1998, 2000), 2 kali juara dalam *Workshop* guru (tahun 1998, 2009), 1 kali finalis dan 2 kali juara dalam Lomba Keberhasilan Guru (tahun: 1999, 2000, 2003), 2 kali juara LKTI "Lingkungan Hidup" (tahun: 2004, 2005), 1 kali juara dalam Kontes Guru MIPA (tahun 2008), 1 kali juara dalam "Lomba Menulis Artikel UKS (tahun 2009), 2 kali juara dalam Lomba Inovasi Guru (tahun: 2006, 2007), 2 kali memenangkan dana hibah Penelitian Tindakan Kelas dari Depdiknas (tahun: 2005, 2006), 2 kali finalis dalam Lomba Media Pembelajaran (tahun 2010, 2011), dan menjadi juara I Guru Berprestasi (tahun 2010). Beberapa naskah karya tulis ilmiahnya telah diterbitkan dan diedarkan secara nasional (3 karya diterbitkan oleh LIPI dan 1 karya oleh Depdiknas). Sebagai akumulasi dari prestasi tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan Satyalencana Pendidikan Tahun 2012.

Setelah diangkat sebagai kepala sekolah, dua prestasi nasional diraihnya, yaitu menerima penghargaan "Anugerah Karya Pendidikan Tingkat Nasional" dan menjadi pemenang II dalam lomba *best practices* kepala sekolah tingkat nasional. Demikian pula setelah menjadi pengawas sekolah, ia kembali memenangkan *best practices* (penulis terbaik) tingkat nasional. Ia juga menerima penghargaan tertinggi dalam bidang pendidikan, yaitu Satyalencana "Widya Kusuma" dari Gubernur Bali. Sebanyak 10 naskah bukunya telah diterbitkan.



Drs. I Wayan Suwita, M.Pd, Lahir di Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, tanggal 12 Maret 1962. Setelah lulus S1, melakukan layanan pendidikan sejak tahun 1986, mulai dari menjadi guru honorer di SMP Saraswati Padangan (Pupuan, Tabanan), menjadi guru tetap yayasan di SMP Laboratorium Unud Singaraja, menjadi Kepala SMP Lab Unud Singaraja, menjadi guru PNS di SMP Negeri 5 Tejakula, SMP Negeri 1 Sawan, SMP Negeri 1 Singaraja, dan SMP Negeri 3 Singaraja.

Pada bulan Juni 2011, memulai karir sebagai Pengawas Sekolah di Disdikpora Kabupaten Buleleng, sambil mengikuti pendidikan S2 di Undiksha Singaraja dalam jurusan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan hingga tamat tahun 2012.

Prestasi yang berhasil diraih diantaranya : menjadi guru berprestasi provinsi Bali (peringkat dua), menjadi Pengawas Berprestasi provinsi Bali (peringkat pertama), pernah unggul menjadi penulis kategori karya berdampak luas di tingkat nasional, pernah menjadi Instruktur Penguatan Kepala Sekolah yang ditugaskan oleh P4TK Malang.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BALI

Jl. Letda Tantular No. 14 Niti Mandala Denpasar 80234

Telp. 0361 225666, Fax. 0361 246682

Pos-el : lpmpbali@kemdikbud.go.id

Laman : lpmpbali.kemdikbud.go.id

ISBN 978-623-7441-48-9



9 786237 441489